

**ANALISIS HUKUM PENGELOLAAN PINJAMAN PADA BADAN USAHA  
MILIK DESA (BUMDES) DILIHAT DARI PERSPEKTIF WAHBAH AZZUHAILI  
(STUDI DI DESA BANGUN REJO KECAMATAN TANJUNG MORAWA)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Syari'ah pada  
Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sumatera Utara

Oleh :

ATIKAH RAHMAH

NIM : 24143033



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019 M / 1440 H

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : ATIKAH RAHMAH

NIM : 24.14.3.033

Jur/Fak : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) / Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM PENGELOLAAN PINJAMAN PADA  
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DILIHAT DARI  
PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI (STUDI DI DESA BANGUN  
REJO KECAMATAN TANJUNG MORAWA)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul diatas adalah hasil karya saya kecuali kutipan-kutipan didalamnya disebutkan sumbernya. Saya menerima segala konsekuensi apabila pernyataan saya tidak benar.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Medan, Maret 2019

Yang membuat pernyataan

ATIKAH RAHMAH

24.14.3.033

**ANALISIS HUKUM PENGELOLAAN PINJAMAN PADA BADAN  
USAHA MILIK DESA (BUMDES) DILIHAT DARI PERSPEKTIF  
WAHBAH AZZUHAILI  
( Studi di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa )**

**Oleh :**

**ATIKAH RAHMAH**

NIM: 24.14.3.033

Menyetujui:

**Pembimbing I**

**Dr. Mustafa Kamal R. S.HI,M.H**  
NIP. 19780725 200801 1 006

**Pembimbing II**

**Zaid Al-Fauza Marpaung ,M.H**  
NIP. 19880824 201503 1 004

Mengetahui:  
Ketua Jurusan  
Muamalah  
Fakultas Syari'ah UIN-SU Medan

**Fatimah Zahara,M.A**  
NIP. 19730208 199903 2 001

## **IKHTISAR**

Skripsi ini berjudul : Analisis Hukum Pengelolaan Pinjaman pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilihat dari Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa).

Dilihat dari penelitian ini, dapat dikemukakan inti permasalahan yang menjadi latar belakangnya ialah : Bagaimana sistem pengelolaan pinjaman pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa dan bagaimana Hukum Pengelolaan pinjaman pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilihat dari perspektif Wahbah Az-Zuhaili. Permasalahan inilah yang akan menjadi pokok permasalahan. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat Wahbah Az-Zuhaili terhadap pengelolaan pinjaman pada Badan Usaha Milik Desa yang terjadi di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa. Penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang informasi dan data yang diperlukan digali serta dikumpulkan dari lapangan yang bersifat deskriptif atau menggambarkan kondisi yang terjadi sekarang ini. Penelitian ini juga merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi yang menjadi objek penelitian yaitu Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa

Menurut keterangan di lapangan, yaitu Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa diketahui bahwa masyarakat meminjam dana di BUMDes dengan sejumlah uang dan dengan tambahan uang saat mengembalikannya. Diketahui juga bahwa, para pengurus BUMDes tidak mendapatkan keuntungan atau upah dalam pekerjaannya sebagai pengurus BUMDes. Dengan begitu, akad atau musyawarah yang ada di BUMDes tidak sesuai antara kesepakatan dengan prakteknya di lapangan.

Pendapat Wahbah Az-Zuhaili tentang pinjaman pada BUMDes dari segi sistem pengelolaan Pinjaman pada BUMDes ialah tidak diperbolehkan dan hukumnya haram. Karena bentuk pengelolaan pinjaman yang terjadi di BUMDes jatuh pada riba.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil ‘alamiin Puji syukur kehadiran Allah Swt. Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta menganugerahkan ilmu bagi hamba-hambaNya, hingga selesailah penulisan skripsi ini. Shalawat beriringan salam yang dhadiahkan untuk Kekasih Allah Rasulullah Nabi Muhammad Saw. yang tiada henti mengingat ummatnya sampai akhir kehidupannya, yang terus berjuang bersama sahabat-sahabat untuk membela Agama Islam yang hingga sekarang dapat kita rasakan nikmat dan indahnya iman dan islam.

Skripsi yang penulis tulis dengan judul **“Analisis Hukum Pengelolaan Pinjaman pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilihat dari Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa”**, akhirnya dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa karya penulisan skripsi ini selesai bukan semata-mata dari hasil karya penulis sendiri saja,tetapi juga karena bantuan dari beberapa pihak yang tulus meluangkan waktu meski hanya sekedar memberi aspirasi, masukan,motivasi dan doa kepada penulis. Ucapan terimakasih dengan segala ketulusan hati penulis ucapkan kepada :

1. Kedua Orangtua tercinta Ibunda Nur Elbi Zuhri Lubis,SE dan Ayahanda Jailani Ludfi,S.P yang telah mengasuh, membesarkan, mendidik dan

selalu memberikan doa, dukungan dan segala kasih sayang yang berlimpah kepada penulis selama nafas ini masih dihirup.

2. Ayahanda Dr. Zulham,M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU
3. Ibunda Fatimah Zahara,M.A selaku Ketua Prodi Studi Muamalah dan Ibunda Tetty Marlina Tarigan,M.Kn selaku Sekretaris Prodi Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU.
4. Ayahanda Dr.Mustafa Kamal Rokan S.HI,MH. Selaku Dosen Pembimbing I dan Ayahanda Zaid Al-Fauza Marpaung,M.Hum Selaku Dosen Pembimbing II yang selama ini membimbing serta memberikan nasehat kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
5. Ayahanda Dr.Watni Marpaung,M.A selaku dosen Penasehat Akademik dan Seluruh Dosen beserta Staff Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU.
6. Saudari-Saudari Tercinta Nurlailan Syahara dan Syaila Khairunnisa serta Sepupu terbaik Amalia Mufrida Batubara,S.Pd yang selalu memberikan semangat, motivasi dan doa terbaiknya untuk penulis.
7. Keluarga Besar Majelis Mardhatillah, terkhusus Ayahanda Indra Surya Lesmana S.E dan Ayahanda Suryadi, Abangda Hawwin Ridho S.Rambe S.E, beserta seluruh sahabat yang telah membantu dan memotivasi

penulis untuk tetap sabar dan semangat dalam menyelesaikan skripsi maupun perkuliahan ini.

8. Keluarga Besar Forum Kajian Ilmu Syari'ah, Dewan Pakar beserta Ikatan Keluarga Alumni FoKIS dan seluruh adik-adik FoKISER
9. Sahabat-Sahabat Tercinta Keluarga Besar Muamalah-B Angkatan 2014 yang telah kebersamaian penulis dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan ini.
10. Sahabat-Sahabat terbaik dunia dan akhirat : Ulfah, Agita, Kiky ,Yulia, Fitri, Fitri, Baina, Alda yang dengan tulus menemani dalam bingkai perjalanan hidup penulis.
11. Mentor terbaik Abangda Liantha Adam Nasution SH.I,M.H., Inspirator sekaligus rekanjuang Abangda Muhammad Hafiz Aziz, SS. Beserta seluruh Keluarga dan sahabat-sahabat Lintas Komunitas yang telah banyak membantu penulis dan selalu memberikan motivasi, doa serta segala waktunya yang penulis butuhkan hingga saat ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat segala kekurangan. Maka dengan terbuka hati penulis berikan dengan segala masukan dan kritik yang mampu membangun untuk penulis agar mampu menjadi lebih baik lagi dimasa mendatang.

Akhir kata, penulis selalu berharap agar Allah Swt. membalas segala kebaikan kepada seluruh pihak yang dengan tulus memberikan doa serta bantuan dukungan. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, Khususnya pengembangan Hukum Ekonomi Syari'ah

Medan, 2019



## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>IKHTISAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Batasan Istilah .....	13
F. Tinjauan Pustaka .....	14
G. Kerangka Pemikiran .....	15
H. Hipotesis .....	19
I. Metode Penelitian .....	20
J. Sistematika Pembahasan .....	26
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PINJAMAN (<i>QARDH</i>)</b>	
A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Qardh</i> .....	27
B. Rukun dan Syarat <i>Qardh</i> .....	34
C. Hikmah <i>Qardh</i> .....	38
D. Tempat dan Waktu Pengembalian <i>Qardh</i> .....	39
E. Pengambilan Manfaat <i>Qardh</i> .....	40

### **BAB III GAMBARAN LOKASI PENELITIAN**

A. Sejarah Berdirinya BUMDes Bangun Rejo .....	43
B. Struktur Kepengurusan BUMDes Bangun Rejo.....	49
C. Visi dan Misi BUMDes Bangun Rejo .....	52
D. Tupoksi dan Kewenangan BUMDes Bangun Rejo .....	53

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Aturan Hukum dan Sistem Pengelolaan BUMDes .....	58
B. Sistem Pengelolaan Pinjaman BUMDes di Desa Bangun Rejo Kec. Tanjung Morawa.....	85
C. Hukum Pengelolaan Pinjaman BUMDes di Desa Bangun Rejo Kec. Tanjung Morawa dilihat dari perspektif Wahbah Az-Zuhaili.....	93

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	97
B. Saran .....	98

### **DAFTAR PUSTAKA .....**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya yang mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Maka desentralisasi kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana-prasarana yang memadai, mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. Maka pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu, Alokasi Dana Desa (ADD) untuk menunjang segala sektor di masyarakat khususnya perekonomian. Adapun pengelolaan dana desa ini, sebahagian dikelola melalui suatu lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah desa terkait, yaitu disebut dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Berdirinya Badan Usaha Milik Desa dilandasi oleh Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa. Pendirian Badan Usaha Milik Desa ini disertai dengan upaya penguatan

kapasitas dan didukung oleh kebijakan Kabupaten yang ikut memfasilitasi dan melindungi usaha Masyarakat desa dari ancaman persaingan para pemodal besar. Mengingat Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan, maka mereka masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. Pembangunan landasan bagi pendirian BUMDes adalah Pemerintah, baik pusat ataupun daerah.<sup>1</sup>

Kualitas kinerja lembaga berkorelasi positif dengan daya dukung pembiayaan yang ada. Ketiadaan dukungan sumberdaya keuangan yang memadai mempengaruhi optimalisasi kinerja lembaga pemerintahan dalam menjalankan tugas-tugasnya melayani masyarakat.<sup>2</sup> BUMDes dalam operasionalisasinya ditopang oleh lembaga moneter desa (bidang pembiayaan). Jika kelembagaan ekonomi kuat dan ditopang kebijakan yang memadai, maka pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan distribusi aset kepada rakyat secara luas akan mampu menanggulangi berbagai permasalahan ekonomi di pedesaan. Tujuan akhir pendirian BUMDes diharapkan menjadi *pioneer* dalam menjembatani upaya penguatan ekonomi di pedesaan untuk mensejahterakan masyarakat terkhusus yang berada dalam kawasan pedesaan.

---

<sup>1</sup> Proposal Pembentukan BUMDES Tunas Makmur Desa Bangun Rejo Kec. Tg.Morawa

<sup>2</sup> Pheni Chalid, *Keuangan Daerah Investasi, Dan Desentralisasi tantangan dan hambatan*, (Jakarta : Kemitraan,2005), h.6

Pendekatan ekonomi akan dikontrol oleh pendekatan hukum. Pendekatan ekonomi lebih mengutamakan tujuan yang akan dicapai, yaitu keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa peduli apakah memperoleh keuntungan itu merugikan pihak lain atau tidak. Kemungkinan merugikan pihak lain itu dapat dibatasi oleh pendekatan hukum, artinya hukum akan mencegah memperoleh keuntungan secara tidak wajar melalui aturan hukum yang telah ditetapkan. Dengan demikian, Lembaga Keuangan yang berusaha di bidang jasa keuangan akan memperoleh keuntungan dalam batas-batas yang ditentukan oleh aturan hukum.<sup>3</sup>

BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDES sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Maka dari itu, terbukanya kemungkinan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagaimana diatur dalam UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa diatur dalam Bab X Badan Usaha Milik Desa Pasal 87 yaitu : (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa. (2), BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. (3),

---

<sup>3</sup> Abdul Kadir Muhammad, Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti,2004), h.4-5

BUMDesa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi/dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan dalam pasal 132 ayat 2 menyatakan bahwa : Pendirian BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Maka dengan adanya Undang-Undang ini, pemerintahan Desa Bangun Rejo memutuskan untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa.

Hukum Islam mengatur segala kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala aspek yang ada kaitannya dengan kehidupan tersebut. Hubungan manusia dengan Allah SWT diatur dalam bidang ibadah, dan hal-hal yang berhubungan antara manusia dengan sesama manusia dalam bidang muamalah. Muamalah merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sebab dengan muamalah ini manusia dapat berhubungan satu sama lain yang menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga akan tercipta segala hal yang diinginkan dalam mencapai kebutuhan hidupnya.<sup>4</sup>

Hubungan antara manusia merupakan manifestasi dari hubungan dengan pencipta. Apabila baik hubungan dengan manusia lain maka baik pula

---

<sup>4</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam perspektif Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta : Kencana, 2012), h.71

hubungan dengan penciptanya. Oleh karena itu, hukum Islam sangat menekankan kemanusiaan. Sesuatu dipandang Islam bermaslahat jika memenuhi 2 unsur, yaitu kepatuhan syariah (halal) dan bermanfaat, serta membawa kebaikan (thayyib) bagi semua aspek menyeluruh yang tidak menimbulkan mudharat dan merugikan pada salah satu pihak.<sup>5</sup>

Adapun Dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa ini, mengelola BUMDes nya dengan sistem pinjaman. Dimana, warga yang membutuhkan pinjaman, wajib menggadaikan barangnya berupa BPKB Motor ataupun surat tanah dan lain sebagainya. Lalu, untuk pengembalian pinjaman masyarakat kepada pihak BUMDesa dikenakan biaya tambahan 1% per bulan atau setiap kali angsuran. dan besaran bunga yang mencapai sekitar 12% setiap tahun.<sup>6</sup>

Mazhab Hanafi dalam pendapatnya yang kuat (rajih) menyatakan bahwa qardh yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut disyaratkan sebelumnya. Jika belum disyaratkan sebelumnya dan bukan merupakan tradisi yang biasa berlaku, maka tidak mengapa.

---

<sup>5</sup> Faturrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah Teori dan Konsep*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), h. 53-54

<sup>6</sup> Wawancara Pra Penelitian dengan Pak Askari selaku Sekretaris BUMDES pada tgl. 10 April 2018

Para ulama Malikiyah berpendapat bahwa tidaklah sah akad qardh yang mendatangkan keuntungan karena ia adalah riba. Dan haram hukumnya mengambil manfaat dari harta peminjam, seperti menaiki hewan tunggangannya dan makan di rumahnya karena alasan utang tersebut, bukan karena penghormatan dan semisalnya.

Ulama Syafiiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa qardh yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan, seperti mengutangkan seribu dinar dengan syarat orang itu menjual rumahnya kepadanya, atau dengan syarat dikembalikan seribu dinar dengan mutu koin dinar yang lebih baik atau dikembalikan lebih banyak dari itu.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili Dalam kitabnya *Fiqih Islam Wa Adillatuhu ialah:*

فان كانت المنفعة للدافع, منع اتفاقا للنهي عنه, وخروجه عن باب المعرف, وان كانت للقباض جاز<sup>7</sup>

Artinya :

*Jika keuntungan tersebut untuk pemberi pinjaman, maka para ulama bersepakat bahwa itu tidak diperbolehkan, karena ada larangan dari syariat dan karena sudah keluar dari syariat dan karena sudah keluar dari jalur kebajikan. Jika untuk penerima pinjaman, maka diperbolehkan.*

---

<sup>7</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islam wa Adillatuhu Juz V*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), h.3796



Sehingga, Wahbah Az-Zuhaili bercondong dengan para *Zumhur Ulama* tentang tidak diperbolehkannya *Qardh* yang mendatangkan keuntungan.

Menurut Wahbah Azzuhaili Dalam kitabnya *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Ringkasnya, akad *Qardh* diperbolehkan dengan 2 syarat

1) Tidak mendatangkan keuntungan.

Jika keuntungan tersebut untuk pemberi pinjaman, maka para ulama bersepakat bahwa itu tidak diperbolehkan, karena ada larangan dari syariat dan karena sudah keluar dari syariat dan karena sudah keluar dari jalur kebajikan. Jika untuk penerima pinjaman, maka diperbolehkan.

Sehingga, *Wahbah Az-Zuhaili* bercondong dengan para *Zumhur Ulama* tentang tidak diperbolehkannya *Qardh* yang mendatangkan keuntungan.

2) Akad *Qardh* ini tidak dibarengi dengan transaksi lain, seperti jual beli dan lainnya. Berdasarkan hadits yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad dari Abdullah bin Amr, "Tidak dibolehkan utang bersama jual beli". Adapun hadiah dari pihak peminjam, maka menurut ulama Malikiyah, hal itu tidak boleh diterima oleh pemberi pinjaman karena dapat mengarah pada penundaan pelunasan. Sedangkan jumhur ulama membolehkannya jika bukan merupakan syarat.

Sebagaimana diperbolehkan juga jika antara keduanya ada hubungan yang menjadi alasan pemberian hadiah dan bukan karena hutang tersebut.<sup>8</sup>

Adapun hutang yang haram ialah pemberi hutang menegaskan kepada pengutang bahwa jika temponya habis, ia harus melunasi atau menambah jumlah hutang itu. Hal ini tentunya riba dan termasuk apa yang ditegaskan Allah Swt. Dalam firman-Nya,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتِغُوا فَلََكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya :

*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kami tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (Q.S. Al-Baqarah :278-279)*

Adapun haditsnya ialah :

---

<sup>8</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, (Jakarta : Gema Insani Darul Fikir,2011),h.382

عن أبي هريرة قال , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا سبعون حوبا ايسرها ان ينكح الرجل امه

Artinya :

*Dari Abu Hurairah ia berkata, “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Riba itu mempunyai tujuh puluh tingkatan, yang paling ringan adalah seperti seseorang yang berzina dengan ibunya.” (HR. Ibn Majah, Bab Taghlid Fir riba, no 2265).*

*Al-Bani dalam sahih al-jami al-shagir mengatakan shahih.*<sup>9</sup>

Adapun hadis yang lain :

عن جابر قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال

هم سواء

Artinya :

*Dari Jabir r.a berkata, bahwa Rasulullah Saw melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberikannya, penulisnya, dan dua saksinya, dan Beliau berkata, mereka semua adalah sama,. (H.R .Muslim).*<sup>10</sup>

Hadits diatas, menggambarkan mengenai bahaya dan buruknya riba bagi kehidupan kaum muslimin. Begitu buruk dan bahayanya riba, sehingga digambarkan bahwa Rasulullah Saw. melaknat seluruh pelaku riba. Pelaknatan Rasulullah Saw. terhadap para pelaku riba menggambarkan betapa mungkarnya

---

<sup>9</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Sahih Al-Jami Al-Shagir*, (Beirut : Al-Maktab Al-Islami, Jil,1) h.337

<sup>10</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath Al-Bari bisyarhi Shahih Al-Bukhari IV*, h.394

perbuatan riba, mengingat Rasulullah Saw. tidak pernah melaknat suatu keburukan, tetapi keburukan tersebut membawa kemudharatan yang luarbiasa, baik dalam skala individu bagi para pelakunya maupun masyarakat secara luas. Oleh karenanya, setiap Muslim wajib menghindari diri dari praktik riba dalam segenap aspek kehidupannya.<sup>11</sup>

Dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa ini, mengelola BUMDes nya dengan sistem pinjaman. Dimana, warga yang membutuhkan pinjaman, wajib menggadaikan barangnya berupa BPKB Motor ataupun surat tanah dan lain sebagainya. Lalu, untuk pengembalian pinjaman masyarakat kepada pihak BUMDesa dikenakan biaya tambahan 1% per bulan atau setiap kali angsuran. Menurut Hukum Ekonomi Syariah bunga pinjaman tersebut termasuk riba. Hal ini tentu kurang sesuai dengan maksud dan tujuan BUMDes untuk mensejahterakan masyarakat dengan adanya unsur kezaliman karena besaran bunga yang mencapai 12% setiap tahun. Sehingga, itu kurang sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah maupun maksud dan tujuan BUMDes itu sendiri .Sehingga dengan itu, Penulis berpendapat perlunya dilakukan penelitian terhadap pengelolaan BUMDes tersebut apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang diatas serta

---

<sup>11</sup>Isnaini Harahap,dkk,*Hadis-Hadis Ekonomi*, (Jakarta : Kencana,2015), h.190-191

agar dapat diketahui, apakah pengelolaan tersebut sepenuhnya berprinsip syariah atau konvensional. Penulis berpendapat bahwasannya penelitian ini dapat mendorong bumdes menerapkan prinsip syariah dalam pengelolaan bumdesnya. Dimana, dalam Undang-Undang tersebut membuka peluang sesuai dengan prinsip syariah.

Maka berdasarkan masalah diatas, penulis memandang perlu untuk meluruskan pandangan Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa terhadap masalah tersebut ,yang akan penulis tuangkan dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **“ANALISIS HUKUM PENGELOLAAN PINJAMAN PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DILIHAT DARI PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI (STUDI DI DESA BANGUN REJO KECAMATAN TANJUNG MORAWA)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka pokok permasalahan yang ingin dikaji ialah :

1. Bagaimana Aturan Hukum Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ?
2. Bagaimana sistem Pengelolaan Pinjaman pada Badan Usaha Milik Desa di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa ?

3. Bagaimana Hukum Pengelolaan Pinjaman Badan Usaha Milik Desa pada Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa menurut perspektif Wahbah Az-Zuhaili ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Aturan Hukum Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
2. Untuk mengetahui Sistem pengelolaan Pinjaman pada Badan Usaha Milik Desa di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa.
3. Untuk mengetahui hukum pengelolaan pinjaman pada Badan Usaha Milik Desa di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa dilihat dari Perspektif Wahbah Az-Zuhaili

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian penyusunan proposal ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis, untuk menambah referensi tentang Hukum sistem pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sesuai dengan hukum Islam.

2. Kegunaan Praktis, sebagai acuan bagi Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mensejahterakan masyarakat di bidang ekonomi.
3. Kegunaan Akademis, sebagai syarat dan kewajiban untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

#### **E. Batasan Istilah**

Adapun batasan istilah ini untuk lebih memudahkan dalam memahami judul penelitian ini, ada beberapa yang harus dikemukakan sebagai batasan istilah sebagai berikut :

1. *Qardh* dalam arti bahasa berasal dari kata : *qaradha* yang sinonimnya : *qatha'a* yang artinya memotong
2. Adapun *Qardh* secara istilah menurut Wahbah Az-Zuhaili yang dikutip dari Hanafiah adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari *mal mitsli* untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, *qardh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (*mal mitsli*) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.
3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah Lembaga Usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat

perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

## **F. Tinjauan Pustaka**

Sejauh yang penulis ketahui, penelitian khusus dalam bentuk skripsi mengenai “Analisis Hukum Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dilihat dari Perspektif Wahbah Az-Zuhaili” belum ada. Akan tetapi penelitian yang berkaitan memang sudah ada seperti skripsi-skripsi maupun jurnal yang disusun dibawah ini :

1. Mirza Iskandar Putra 2017, dalam program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta , dengan Judul Skripsinya “Pengelolaan Dana Desa Untuk Pengembangan Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus di Desa Sindon Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali)
2. Herlina 2012, dalam program studi Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan judul skripsinya “Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat ditinjau menurut



ekonomi islam (Studi di Desa Pekan Tua Kecamatan Kempas Kabupaten

Indragiri Hilir)

3. Reza M.Zulkarnaen 2016, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Padjajaran Bandung dengan Judul Jurnalnya “Pengembangan Potensi

Ekonomi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pondok

Salam Kabupaten Purwakarta

### **G. Kerangka Pemikiran**

Ad-dayn, yaitu hutang dalam bentuk pembiayaan dengan maksud penundaan tanggung jawab yang muncul dari suatu kontrak yang melibatkan pertukaran nilai. Secara ideal, bentuk hutang jenis ad-dayn ini adalah cara hutang yang paling baik. Yakni, hutang yang diberikan dalam kerangka pembiayaan yang bernilai produktif. Pinjaman yang produktif diejawantahkan dalam bentuk akad Musyarakah, Murabahah, Muzaraah.<sup>12</sup>

Berdasarkan pandangan *Wahbah Az-Zuhaili* Dalam bentuk pembiayaan, ada beberapa konsep Syariah yaitu diantaranya : adanya konsep *Murabahah*, *Musyarakah*, *Mudharabah*.

---

<sup>12</sup> Mustafa Kamal Rokan, *Bisnis Ala Nabi* (Yogyakarta : Bunyan, 2013) h.100-101

*Murabahah* merupakan salah satu jenis dari bentuk jual beli amanah atau kepercayaan. Dalam kitab terjemah *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* karangan Wahbah Az-Zuhaili, “*Murabahah* yaitu menjual barang sesuai dengan menambah keuntungan tertentu<sup>13</sup> .

*Murabahah* termasuk transaksi yang dibolehkan oleh syariat. Mayoritas ulama dari kalangan para sahabat, tabiin dan para imam madzhab, juga membolehkan jual beli jenis ini. Hal ini berdasarkan terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah yang memperbolehkan transaksi jual beli murabahah, yaitu :

Q.S. An-nisa (4) :29 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(Q.S. An-nisa'[4]:29)

Murabahah adalah jual beli dimana harga dan keuntungan disepakati antara penjual dan pembeli. Sedangkan aplikasi dalam lembaga keuangan pada

---

<sup>13</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu Jilid 5*, h.358

sisi aset, murabahah dilakukan antara nasabah sebagai pembeli dan lembaga keuangan sebagai penjual dengan harga dan keuntungan disepakati diawal.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili syirkah adalah kesempatan dalam pembagian hak dan usaha. Menurut bahasa, musyarakah adalah bercampurnya suatu harta yang lain sehingga keduanya tidak bisa dibedakan lagi.<sup>14</sup>

Syirkah atau musyarakah berarti akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberi kontribusi dana atau mal, dengan kesepakatan bahwa resiko dan keuntungan akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.<sup>15</sup>

*Mudharabah* adalah akad yang didalamnya pemilik modal memberikan modal (harta) pada 'Amil (pengelola) untuk mengelolanya dan keuntungan menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakatkan. Sedangkan kerugian hanya menjadi tanggungan pemilik modal saja. 'Amil tidak menanggung kerugian apapun kecuali usaha dan kerjanya saja.<sup>16</sup> Para imam madzhab sepakat bahwa hukum mudharabah adalah boleh berdasarkan al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan qiyas. .

---

<sup>14</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, (Jakarta : Gema Insani Darul Fikir,2011),h.441

<sup>15</sup> Muhammad Ridwan, *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka SM,2007), h.39

<sup>16</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, h.476

*Qardh* adalah sebagai bentuk pemberian harta dari seseorang (kreditur) kepada orang lain (debitur) dengan ganti harta sepadan yang menjadi tanggungannya (debitur), yang sama dengan harta yang diambil, dimaksudkan sebagai bantuan kepada orang yang diberi saja. Harta tersebut mencakup harta *mitsliyat*, hewan dan barang dagangan.<sup>17</sup>

Mazhab Hanafi dalam pendapatnya yang kuat (rajih) menyatakan bahwa *qardh* yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut disyaratkan sebelumnya. Jika belum disyaratkan sebelumnya dan bukan merupakan tradisi yang biasa berlaku, maka tidak mengapa.

Sebagaimana yang telah dipaparkan penulis dalam latar belakang diatas, dimana Para ulama Malikiyah berpendapat bahwa tidaklah sah akad *qardh* yang mendatangkan keuntungan karena ia adalah riba. Dan haram hukumnya mengambil manfaat dari harta peminjam, seperti menaiki hewan tunggangannya dan makan di rumahnya karena alasan utang tersebut, bukan karena penghormatan dan semisalnya.

Ulama *Syafiiyah* dan *Hanabilah* berpendapat bahwa *qardh* yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan, seperti “*mengutangkan seribu dinar dengan syarat orang itu menjual rumahnya kepadanya, atau dengan*

---

<sup>17</sup>*Ibid*, h.374

*syarat dikembalikan seribu dinar dengan mutu koin dinar yang lebih baik atau dikembalikan lebih banyak dari itu”.*<sup>18</sup>

Jika keuntungan tersebut untuk pemberi pinjaman, maka para ulama bersepakat bahwa itu tidak diperbolehkan, karena ada larangan dari syariat dan karena sudah keluar dari syariat dan karena sudah keluar dari jalur kebajikan. Jika untuk penerima pinjaman, maka diperbolehkan. Sehingga, *Wahbah Azzuhaili* bercondong dengan para *Zumhur Ulama* tentang tidak diperbolehkannya *Qardh* yang mendatangkan keuntungan.

## **H. Hipotesis**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan kerangka pemikiran diatas, penulis mempunyai hipotesis (jawaban sementara) bahwa praktik sistem pinjaman dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk kesejahteraan masyarakat yang terjadi di desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa ini tidak sesuai dengan pendapat Wahbah Az-Zuhaili maupun tujuan BUMDes itu sendiri. Jadi, berdasarkan ketidak sesuaian dengan pendapat *Wahbah Az-Zuhaili* yang telah dipaparkan diatas, bahwa sistem pinjaman dengan mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan (haram) , karena

---

<sup>18</sup> *Ibid*, h.380

adanya larangan dari syariat dan sudah keluar dari syariat maupun dari jalur untuk usaha kebajikan. Begitupun juga dengan konsep-konsep syariah yang telah dipaparkan diatas menurut penulis, dengan adanya Konsep-konsep syariah ini membuka peluang bagi BUMDes untuk bisa menciptakan tujuannya yaitu untuk mensejahterakan masyarakat bukan hanya dengan teori semata, namun juga dengan dalam praktiknya.

## **I. Metode Penelitian**

Metode adalah rumusan cara-cara tertentu secara sistematis yang diperlukan dalam bahasa ilmiah, agar pembahasan menjadi terarah, sistematis dan obyektif, maka digunakan metode ilmiah.<sup>19</sup> Untuk penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode antara lain

### **1. Jenis Penelitian**

Ditinjau dari Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field reseach*), yaitu suatu penelitian yang meneliti obyek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dengan menggunakan pendekatan sosial (*sosial Oprouch*).

---

<sup>19</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Reseach* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, Cet. Ke-I, 1990), h. 4

. Fokus dari penelitian ini, penulis ingin mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam hal mensejahterakan ekonomi Masyarakat.

## 2. Sumber Data

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian ini yang akan dijadikan peneliti sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data tersebut adalah:

### a. Data Primer

Jenis data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Sedangkan sumber data primer adalah sumber data yang memberikan data penelitian secara langsung.<sup>20</sup> Data primer dalam penelitian ini adalah pandangan dan praktek masyarakat Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa tentang pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa yang diperoleh dengan cara mengumpulkan dokumentasi, observasi (pengamatan) dan wawancara. Dalam melakukan observasi peneliti akan terjun langsung ke tempat penelitian, sedangkan wawancara akan dilakukan kepada Pengurus BUMDes,

---

<sup>20</sup> Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 87-88

Kepala Desa dan sebagian masyarakat / Nasabah BUMDes Desa Bangun Rejo

Kecamatan Tanjung Morawa

#### b. Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data primer.<sup>21</sup> Data yang diambil penulis dalam skripsi ini adalah data pendukung yang bersifat membantu serta melengkapi data primer. Data ini diperoleh penulis dari yang khusus seperti kitab *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* karangan Wahbah Az-Zuhaili dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta buku dan literatur lainnya yang dapat menjawab permasalahan yang penulis teliti.

### 3. Pengumpulan Data

#### a. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta, Raja Grafindo, 1998), h. 85

<sup>22</sup> Husaini Usman, et al, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta : Bumi Aksara, Cet. Ke-I, 1996), h. 73.



Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa.

b. Observasi

Metode observasi adalah suatu bentuk penelitian dimana manusia menyelidiki, mengamati terhadap obyek yang diselidiki, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>23</sup>

Observasi ini dilakukan pada Pengurus BUMDes dan masyarakat desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa. Dalam hal ini yang di observasi adalah Praktek dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa.

c. Wawancara / Interview

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya dan penjawab dengan menggunakan alat yang digunakan *Interview Guide* (Pedoman Wawancara)<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Winarno Surahmad, *Dasar dan Teknik Research* (Bandung : CV. Tarsito, 1972), h. 155.

<sup>24</sup> Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 202

Dalam hal ini penulis menggunakan metode wawancara guna mengumpulkan data secara lisan dari masyarakat yang bersangkutan. Dalam hal ini yang diwawancarai adalah Pengurus BUMDes, Kepala Desa dan sebagian masyarakat Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa.

## 1. Metode Analisis Data

Sebagai tindak lanjut pengumpulan data, maka analisis data menjadi sangat signifikan untuk menuju penelitian ini. Keseluruhan data yang diperoleh dari hasil penelitian *Miles dan Huberman* yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan menggunakan beberapa bagian yaitu, pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), Penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclutions*).

### 1) Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil wawancara, observasi dan berbagai dokumentasi berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.

### 2) Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan

mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi.

### 3) Penyajian Data (*data display*)

Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan.<sup>25</sup>

### 4) Penarikan Kesimpulan atau verifikasi (*conclutions*)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut dengan verifikasi data. Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga di verifikasi selama penelitian berlangsung.

---

<sup>25</sup> Matthew B Miles dan Amichael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*, Terj. Tjejep Rohendi Rohisi, (Jakarta : Univeristas Indonesia, 2007), h. 84

## **J. Sistematika Pembahasan**

Agar penulisan karya ilmiah ini lebih sistematis, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I : merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, Tinjauan Pustaka, Kerangka Pemikiran, Hipotesis, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II : merupakan pembahasan tentang Konsep Pinjaman (*Qardh*) yang terdiri dari pengertian/definisi Pinjaman (*Qardh*), Landasan Hukum Pinjaman (*Qardh*), Rukun dan Syarat *Qardh*, Hikmah *Qardh*, Tempat dan Waktu Pengembalian *Qardh*, Pengambilan Manfaat dalam *Qardh*

Bab III : merupakan pembahasan tentang gambaran umum lokasi penelitian di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa

Bab IV : merupakan pembahasan tentang aturan hukum Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, sistem Pengelolaan Pinjaman pada Badan Usaha Milik Desa di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa, Hukum Pengelolaan Pinjaman Badan Usaha Milik Desa pada Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa dilihat dari perspektif Wahbah Az-Zuhaili. dan analisis penulis.

Bab V : merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM PINJAMAN (*AL-QARDH*)

#### A. Pengertian dan Dasar Hukum *Qardh*

##### 1. Pengertian *Qardh*

Secara etimologi *qardh* berarti الْقَطْعُ (memotong). *Qardh* dalam arti bahasa berasal dari kata : *qaradha* yang sinonimnya : *qatha'a* artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*). Dinamakan tersebut karena uang yang diambil oleh orang yang meminjamkan memotong sebagian hartanya.<sup>26</sup>

Harta yang dibayarkan kepada *muqtarid* (yang diajak akad *qardh*) dinamakan *qarad*, sebab merupakan potongan dari harta *muqrid* (pemilik barang). *Qiradh* merupakan kata benda (*masdar*). Kata *qiradh* memiliki arti bahasa yang sama dengan *qardh*. *Qiradh* juga berarti kebaikan dan atau keburukan yang kita pinjamkan. *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada *muqtaridh* yang membutuhkan dana dan/atau uang.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2008), Jilid 4 , h.181

<sup>27</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), h.4

Secara terminologis *Qardh* adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari.<sup>28</sup>

Dalam pengertian istilah, *qardh* didefinisikan oleh Hanafiah sebagai berikut :

القرض هو ما تعطيه من مال مثلي لتتقاضاه, أو بعبارة أخرى هو عقد مخصوص يرد على دفع مال مثلي لأخر ليرد مثله.

*Qardh* adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari *mal mitsli* untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, *qardh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (*mal mitsli*) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.

Hanabilah sebagaimana dikutip oleh Ahli Fikri memberikan definisi *Qardh* sebagai berikut<sup>29</sup>

الْقَرْضُ دَفْعُ بِهِ وَيَرُدُّ بَدَلَهُ

*Qardh* adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya.

Syafi'iyah sebagaimana dikutip oleh Ahli Fikri memberikan definisi *Qardh* sebagai berikut<sup>30</sup>

الشَّيْءُ فِعْيَةٌ قَالُوا : الْقَرْضُ يُطْلَقُ شَرْعاً بِمَعْنَى الشَّيْءِ الْمُقْرَضِ

<sup>28</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2013), h.333

<sup>29</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2013) h.273

<sup>30</sup> *Ibid*, h. 274

*Syafi'iyah berpendapat bahwa qardh dalam istilah syara' diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan).*

secara istilah dikutip dari Antonio Syafi'i bahwa *Al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan. Dalam literatur fiqih klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.<sup>31</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, *Qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan Syari'ah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam waktu tertentu.<sup>32</sup> Definisi yang dikemukakan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diatas bersifat aplikatif dalam akad pinjam-meminjam antara nasabah dan Lembaga Keuangan Syari'ah.<sup>33</sup>

Dari definisi-definisi yang telah penulis kemukakan diatas, dapat diambil intisari bahwa *qardh* adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk

---

<sup>31</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktik, cet ke-2* (Jakarta : Gema Insani,2001) h.131

<sup>32</sup> Pasal 20 Ayat 36, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Bandung: Fokusmedia,2010) h.18

<sup>33</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, h.334

dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.<sup>34</sup>

Berdasarkan penjelasan ini, maka dapat dipahami bahwa *Qardh* adalah pinjaman uang atau modal yang diberikan seseorang kepada pihak lainnya, dimana pinjaman tersebut digunakan untuk usaha atau menjalankan bisnis tertentu. Pihak peminjam berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya tanpa bergantung pada untung atau rugi usaha yang dijalankannya. Pinjaman *Qardh* juga tidak berbunga, karena prinsip dalam *Qardh* adalah tolong-menolong.<sup>35</sup>

## **2. Dasar Hukum disyariatkannya Qardh**

### **a. Dalil yang berasal dari Al-Qur'an**

Q.S. Al-Baqarah (2) : 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْضَاعًا كَثِيرَةً ۖ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

<sup>34</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h.274

<sup>35</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016) h.169



Artinya :

*Barangsiapa meminjam Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan.*<sup>36</sup>

Q.S. Al-Hadid (57) : 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَكْرَمَ كَرِيمًا ﴿١١﴾

Artinya :

*Barangsiapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipatganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.*<sup>37</sup>(Q.S. Al-Hadid (57) : 11)

Q.S. At-Taghabun (64) : 17

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٧﴾

Artinya :

*Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipatgandakan (balasan) untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Penyantun.*<sup>38</sup>(Q.S.At-Taghabun :17)

<sup>36</sup> Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta : Wali, 2012) h.39

<sup>37</sup> Ibid, h.538

<sup>38</sup> Ibid, h.557

Ayat-ayat tersebut pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan *qardh* (memberikan hutang) kepada orang lain, dan imbalannya adalah akan dilipatgandakan oleh Allah Swt.

Dari sisi *muqridh* (orang yang memberikan hutang), Islam menganjurkan kepada ummatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi hutang. Dari sisi *muqtaridh*, hutang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan dibolehkan karena seseorang berhutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang dihutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikannya persis seperti yang diterimanya. Dalam kaitan dengan hal ini ada hadits yang berisi anjuran untuk membantu orang lain, antara lain :

#### **b. Dalil yang berasal dari Hadis**

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً.

*Artinya :*

*Dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "Tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim pinjaman (qardh) dua kali, maka seperti sedekah satu kali."*<sup>39</sup>(H.R. Ibn Majah)

---

<sup>39</sup> Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, *Nail Al-Authar Juz 5 cet.1* (Beirut :Dar Al-Fikr. 1982 ) h.347

عَنْ أَبِي حُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنَ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ, وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ فِي الدُّنْيَا يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ فِي الدُّنْيَا سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَحِبِّهِ .

*Artinya :*

*Dari Abu Hurairah dari Nabi Saw. beliau bersabda : Barangsiapa yang melepaskan dari seorang muslim kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat; dan barangsiapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan di dunia, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat; dan barangsiapa yang menutupi aib seorang muslim di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat; dan Allah akan senantiasa menolong hambanya, selama hamba itu menolong saudaranya. (H.R. At-Tarmidzi)*

Dari hadits tersebut dapat dipahami bahwa qardh (hutang atau pinjaman) merupakan perbuatan yang dianjurkan, yang akan diberi imbalan oleh Allah Swt. dalam hadits yang pertama disebutkan bahwa apabila seseorang memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain, maka Allah akan memberikan pertolongan kepadanya di dunia dan akhirat. Sedangkan dalam hadits yang kedua dan ketiga dijelaskan bahwa memberikan hutang atau pinjaman dua kali nilainya sama dengan memberikan sedekah satu kali. Ini

berarti bahwa *Qardh* (memberikan hutang atau pinjaman) merupakan perbuatan yang sangat terpuji karena bisa meringankan beban orang lain.<sup>40</sup>

### c. Dalil yang berasal dari Ijma'

Dari pemaparan hadis diatas, kita bisa simpulkan bahwa *qardh* hukumnya sunnah (dianjurkan) bagi orang yang meminjamkan dan boleh bagi orang yang meminjam.<sup>41</sup>

Para ulama telah menyepakati bahwa *Qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.<sup>42</sup>

## B. Rukun dan Syarat *Al-Qardh*

### 1. Rukun *Qardh*

- 1) Aqid ialah orang yang berakad (dua belah pihak), dalam arti pihak pertama adalah orang yang menyediakan harta atau pemberi harta (yang

---

<sup>40</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, .... h.276-277

<sup>41</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemahan Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, h.374

<sup>42</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktik, cet ke-2* h.132-133

meminjamkan), dengan pihak kedua adalah orang yang membutuhkan harta atau orang yang menerima harta (meminjam). Seorang yang berakad terkadang orang yang memiliki hak (aqid ashli) dan merupakan wakil dari yang memiliki hak. Syarat dari kedua orang yang melakukan akad yaitu cakap bertindak (ahli), tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang dibawah pengampuan (mahjur) karena boros atau lainnya.

- 2) *Mau'qud 'Alaih* adalah benda-benda yang diakadkan, seperti benda (harta). Dalam arti setiap perikatan dalam akad al-qard harus ada barang sebagai perikatan atau transaksi (objek akad). Syarat objek akad adalah dapat menerima hukumnya.

- 3) *Maudhu' al 'aqd* adalah atau maksud pokok mengadakan akad .

Dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti, dan dalam akad jual beli ini akan mendapatkan keuntungan. Berbeda dengan perikatan atau aqad al-qard yang tujuan pokok perikatannya adalah tolong menolong dalam arti meminjamkan harta tanpa mengharapkan imbalan, uang yang dipinjamkan dikembalikan sesuai dengan uang yang dipinjamkan, tidak

ada tambahan dalam pengembalian uangnya. Syaratnya adalah ada itikad baik.<sup>43</sup>

## 2. Syarat *Qardh*

Ada 4 syarat sahnya *qardh* menurut Wahbah Az-Zuhaili, yaitu :

Pertama, Akad *Qardh* dilakukan dengan sighat ijab qabul atau bentuk lain yang bisa mengantikannya, seperti cara mu'athah (melakukan akad tanpa ijab qobul) dalam pandangan jumhur ulama, meskipun menurut *syafi'iyah* cara mu'athah tidaklah cukup sebagaimana dalam akad-akad lainnya.

Kedua, adanya kapabilitas dalam melakukan akad. Artinya, baik pemberi maupun penerima pinjaman adalah orang *baligh*, berakal, bisa berlaku dewasa, berkehendak tanpa paksaan, dan boleh melakukan *tabarru'* (berderma). Karena *qardh* adalah bentuk akad *tabarru'*. Oleh karena itu tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang bodoh, orang yang dibatasi tindakannya dalam membelanjakan harta, orang yang dipaksa atau ada kebutuhan. Hal itu karena mereka semua bukanlah orang yang dibolehkan melakukan akan *tabarru'*.

Ketiga, menurut Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta mitsli. Sedangkan dalam pandangan jumhur ulama dibolehkan dengan harta apa saja

---

<sup>43</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008) h.50

yang bisa dijadikan tanggungan, seperti uang, biji-bijian, dan harta *qimiy* seperti hewan, barang yang bergerak dan lainnya.

Keempat, harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan, maupun ukuran panjang supaya mudah dikembalikan. Dan dari jenis yang belum tercampur dengan jenis lainnya seperti gandum yang bercampur dengan jelas karena sukar mengembalikan gantinya.<sup>44</sup>

Wahbah Az-Zuhaili juga menjelaskan 2 syarat lain dalam akad *qardh*, pertama, *Qardh* tidak boleh mendatangkan keuntungan atau manfaat bagi pihak yang meminjamkan. Kedua, akad *Qardh* tidak dibarengi dengan transaksi lain, seperti jual beli dan lainnya.

### **3. Syarat yang sah dan yang tidak sah**

Adanya kesepakatan yang dibuat untuk mempertegas hak milik dalam akad *qardh* diperbolehkan, seperti persyaratan adanya barang jaminan, penanggung pinjaman, saksi, bukti tertulis, atau pengakuan di hadapan hakim.

Mengenai batasan waktu, jumhur ulama mengatakan syarat itu tidak sah, dan malikiyah mengatakan sah. Tidak sah syarat yang tidak sesuai dengan akad *qardh* seperti syarat tambahan dalam pengembalian, pengembalian harta yang bagus sebagai ganti yang cacat.

---

<sup>44</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemahan Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*. h.378-379

Adapun syarat yang *fasid* (rusak) diantaranya adalah syarat tambahan atau hadiah bagi si pemberi pinjaman. Syarat ini dianggap batal namun tidak merusak akad apabila tidak ada kepentingan siapapun, seperti syarat pengembalian barang cacat sebagai ganti yang sempurna atau yang jelek sebagai ganti yang bagus atau syarat memberikan pinjaman kepada orang lain.

### C. Hikmah Qardh

Adapun hikmah disyariatkannya *Qardh* dilihat dari sisi yang menerima hutang atau pinjaman (*muqtaridh*) adalah membantu mereka yang membutuhkan. Ketika seorang sedang terjepit dalam kesulitan hidup, seperti kebutuhan biaya untuk masuk sekolah anak, membeli perlengkapan sekolahnya, bahkan untuk makannya, kemudian ada orang yang bersedia memberikan pinjaman uang tanpa dibebani tambahan bunga, maka beban dan kesulitannya untuk sementara dapat teratasi. Dilihat dari sisi pemberi pinjaman (*Muqridh*), *Qardh* dapat menumbuhkan jiwa ingin menolong orang lain, menghaluskan perasaannya, sehingga ia peka terhadap kesulitan yang dialami oleh saudara, teman dan tetangganya.<sup>45</sup> Adapun Hikmah *Qardh* ialah Melaksanakan kehendak Allah agar kaum muslimin saling menolong dalam kebaikan dan

---

<sup>45</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h.277



ketakwaan, dan Menguatkan ikatan ukhuwah dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan dan meringankan beban orang yang tengah dilanda kesulitan.

#### **D. Tempat dan Waktu Pengembalian *Qardh***

Ulama Fiqh sepakat bahwa *Qardh* harus dibayar ditempat terjadinya akad secara sempurna. Namun demikian, boleh membayarnya ditempat lain apabila tidak ada keharusan untuk membawanya atau memindahkannya, juga tidak ada halangan di jalan. Sebaliknya, jika terdapat halangan apabila membayar ditempat lain, *muqrid* tidak perlu menyerahkannya.<sup>46</sup>

Sedangkan waktu pengembalian *qardh* menurut Jumhur Ulama, selain Malikiyah mengatakan bahwa waktu pengembalian harta pengganti adalah kapan saja terserah kehendak si pemberi pinjaman, setelah peminjam menerima pinjamannya, karena *qardh* merupakan akad yang tidak mengenal waktu. Sedangkan menurut Malikiyah, waktu pengembalian itu adalah ketika sampai pada batas waktu pembayaran yang sudah ditentukan diawal, karena mereka berpendapat bahwa *qardh* bisa dibatasi dengan waktu.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Rachmad Syafei, Fiqh Muamalah , (Bandung : Pustaka Setia, 2001) h.156

<sup>47</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemahan Fiqh Islam Wa Adillatuhu* [1].379

### E. Pengambilan Manfaat dalam *Qardh*

Para Ulama sepakat bahwa setiap pinjaman hutang yang mengambil manfaat hukumnya haram, apabila hal itu disyaratkan atau ditetapkan dalam perjanjian. Hal ini sesuai dengan kaidah :

كل قرض جر نفعا فهو ربا

*Semua hutang yang menarik manfaat, maka ia termasuk riba.*

Apabila manfaat (kelebihan) tidak disyaratkan pada waktu akad maka hukumnya boleh. Hal ini sesuai dengan hadits nabi Saw.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اسْتَقْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سِنًا , فَأَعْطَى سِنًا خَيْرًا مِنْ سِنِّهِ وَقَالَ خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً .

*Artinya :*

*Dari Abu Hurairah ra. Ia berkata : Rasulullah Saw. berhutang seekor unta, kemudian beliau membayarnya dengan seekor unta yang lebih baik daripada unta yang dihutangnya, dan beliau bersabda : sebaik-baik kamu sekalian adalah orang yang paling baik membayar hutang “ (HR.Ahmad dan At-Tarmidzi dan ia menyahihkannya)<sup>48</sup>*

Oleh karena itu dalam konteks ini, seorang penerima gadai (*murtahin*) yang memberikan hutang tidak boleh mengambil manfaat atas barang gadaian, apabila hal itu disyaratkan dalam perjanjian. Apabila tidak disyaratkan, menurut pendapat yang *rajih* dari *mazhab* Hanafi, hukumnya boleh tetapi makruh,

---

<sup>48</sup> Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, *Nail Al-Authar cet.I..* h.347

kecuali apabila diizinkan oleh *rahin* (orang yang menggadaikan). Sedangkan menurut pendapat sebagian Hanafiah, meskipun diizinkan oleh *rahin* pengambilan manfaat tersebut hukumnya tetap tidak boleh.

Para Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tidaklah sah akad *qardh* yang mendatangkan keuntungan karena ia adalah riba. Dan haram hukumnya mengambil manfaat dari harta peminjam, seperti menaiki hewan tunggangannya dan makan dirumahnya karena alasan hutang tersebut bukan karena penghormatan dan semisalnya.

Ulama Syafiiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *Qardh* yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan, seperti mengutangkan seribu dinar dengan syarat orang itu menjual rumahnya kepadanya, atau dengan syarat dikembalikan seribu dinar dengan mutu koin dinar yang lebih baik atau diembalikan lebih banyak dari itu. alasannya, karena Nabi Saw. melarang akad *salaf* (hutang) bersama jual beli. *Salaf* adalah *qardh* dalam bahasa rakyat Hijaz. Disamping ada riwayat dari Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas ra. Bahwa mereka melarang *qardh* yang menarik keuntungan. Selain itu, *qardh* adalah akad tolong-menolong dan merupakan ibadah. Oleh karena itu, dalam keadaan ini, akad *qardh* itu tetap sah tapi syarat keuntungan adalah batal, baik keuntungan itu berupa uang maupun barang, banyak maupun sedikit.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili Dalam kitabnya *Fiqh Islam Wa Adillatuhu ialah:*

فان كانت المنفعة للدافع, منع اتفاقا للنهي عنه, وخروجه عن باب المعرف, وان كانت للقباض جاز<sup>49</sup>

Artinya :

*Jika keuntungan tersebut untuk pemberi pinjaman, maka para ulama bersepakat bahwa itu tidak diperbolehkan, karena ada larangan dari syariat dan karena sudah keluar dari syariat dan karena sudah keluar dari jalur kebajikan. Jika untuk penerima pinjaman, maka diperbolehkan.*

Sehingga, Wahbah Az-Zuhaili bercondong dengan para *Zumhur Ulama* tentang tidak diperbolehkannya *Qardh* yang mendatangkan keuntungan.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islam wa Adillatuhu Juz V*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), h.3796

<sup>50</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, h.382

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

##### **A. Sejarah Berdiri BUMDes Bangun Rejo**

Berdasarkan hasil Musyawarah Desa disepakati nama BUMDes di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa adalah “BUMDes Tunas Makmur”.

BUMDes ini didirikan di Kantor Kepala Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa pada hari selasa, tanggal 23 Maret 2017. Sekretariat Badan Usaha Milik Desa Tunas Makmur inipun terletak di Kantor Kepala Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa, tepatnya di Jl. Limau Mungkur Dusun V Desa Bangun Rejo, dengan unit usaha yang dilakukan yaitu SIMPAN PINJAM DAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF DAN JUGA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH, ini sangat didukung karena di desa Bangun Rejo sangat membutuhkan dana tunai untuk modal usaha pertanian, industri kecil dan menengah dan juga untuk ekonomi kreatif.<sup>51</sup>

Tujuan pembentukan BUMDes Tunas Makmur ini ialah sebagai lokomotif pembangunan ekonomi lokal tingkat desa. Prmbangunan ekonomi lokal desa ini didasarkan oleh kebutuhan, potensi, kapasitas desa, dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan

---

<sup>51</sup> Misno, Kepala Desa, Wawancara pada tgl.4 Agustus 2018

kekayaan desa dengan tujuan akhirnya adalah meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa. Dasar pembentukan BUMDes sebagai lokomotif pembangunan di desa lebih dilatarbelakangi pada prakarsa pemerintah dan masyarakat desa dengan berdasarkan pada prinsip kooperatif, partisipatif, dan emansipatif dari masyarakat desa.<sup>52</sup>

Dalam Proses Pembentukan BUMDes di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa, telah dilakukan musyawarah Pembentukan BUMDes pada tanggal 13 Maret 2017, yang diundang sebanyak 65 Orang namun dihadiri oleh 41 orang diantaranya : Kepala Desa, BPD, LKMD, Kepala Dusun, Anggota PKK, Anggota Karang Taruna serta tokoh Masyarakat Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa. Dalam musyawarah tersebut telah disepakati pembentukan dan pendirian BUMDes di Desa Bangun Rejo serta agenda kesepakatan Bersama BPD dengan Pemerintah Desa tentang Pendirian BUMDes Tunas Makmur Desa Bangun Rejo pada tanggal 23 Maret 2017, yang dihadiri dan disepakati oleh 27 Orang diantaranya : Kepala Desa, Sekretaris Desa, BPD, Kaur. Pembangunan, Kaur Umum, Kaur Keuangan/ Bendahara Desa, Kadus dan

---

<sup>52</sup> Proposal Pembentukan BUMDes Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa

Pegurus BUMDes (Ketua, Sekretaris dan Bendahara BUMDes) sekaligus disetujui terbitnya Peraturan Desa No.03.a Tahun 2017.<sup>53</sup>

**Tabel I**

Musyawarah Pembentukan BUMDes yang dihadiri sebanyak 41 Orang, diantaranya :<sup>54</sup>

No.	Nama	Jabatan
1.	Misno	Kepala Desa
2.	Mujian	BPD VII
3.	Samidi	Sek. LKMD
4.	Wagiono	Anggota LKMD
5.	Khairuddin	Kaur Desa
6.	Kasmiyati	Plt. SekDes
7.	L. Wendi	PLD
8.	Yono Susilo	Tokoh Masyarakat
9.	Suwarno	KaDus VI
10.	Jumirun	KaDus VIII
11.	Raliyanto	RIN
12.	Andardas Trg.	KaDus III
13.	Jusup Trg.	BPD III
14.	Adi Sukoco	BPD II
15.	Sri Sugiarto	Bendahara LKMD
16.	Toiman	Masyarakat
17.	Mulianto	RT IV
18.	Waris	BPD VIII
19.	Suwito	KaDus V
20.	Sutarno	RT IV
21.	Almansyah	RT IV
22.	Sumadi	BPD VIII
23.	Sugeng	K.T

<sup>53</sup> Berkas Data Notulen Rapat Pembentukan BUMDes Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa

<sup>54</sup> Daftar Hadir Rapat Pembentukan BUMDes Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa

24.	Sukardi	BPD X
25.	Suwadi	BPD VI
26.	Heri Setiawan	Masyarakat
27.	Wiwin Setiawan	Masyarakat
28.	Sunarwan	Masyarakat
29.	A. Lubis	Masyarakat
30.	Wahyu Kurniawan	BPD IV
31.	Gusri Winda Sari	Kaur Umum
32.	Halimah	Anggota PKK
33.	Sayani	Bendahara PKK
34.	Ny. Rusmini Sukoco	Anggota PKK
35.	Askari	Anggota Karang Taruna
36.	Mawan Marwanto	KaDus I
37.	Sudarno	KaDus VII
38.	Susanto	KaDus IV
39.	Panijah	PKK
40.	Srigiati	KaDus II
41.	Tiono	Masyarakat

**Tabel II**

Musyawarah Pembahasan Bersama Rancangan Peraturan Desa BUMDES ini dihadiri sebanyak 27 orang, diantaranya :<sup>55</sup>

No.	Nama	Jabatan
1.	Mujian	Ketua BPD
2.	Nurmansyah	Wakil Ketua BPD
3.	Misno	Kepala Desa
4.	Kasmiyati	Plt. Sekdes
5.	Muliyadi	Ang. BPD
6.	Wahono,S, S.Ag	Ang. BPD
7.	Jusup Tarigan	Ang. BPD
8.	Wahyu Kurniawa , SE, SP.di	Ang. BPD
9.	Sukardi	Ang. BPD

---

<sup>55</sup> Daftar Hadir Rapat Kesepakatan Bersama BPD dengan Pemerintah Desa dan Rancangan Peraturan Desa



10.	Suwadi	Ang. BPD
11.	Waris	Ang. BPD
12.	Sumadi	Ang. BPD
13.	Adi Sukoco	Ang. BPD
14.	Khairuddin	Kaur. Pembangunan
15.	Gusri Windasari	Kaur Umum
16.	Wagiatik, SE	Kaur, Keuangan/Bendahara Desa
17.	Mawan Marwanto	Kadus I
18.	Sri Giati	Kadus II
19.	Andarias Tarigan	Kadus III
20.	Susanto	Kadus IV
21.	Suwito	Kadus V
22.	Suwarno	Kadus VI
23.	Sudarno	Kadus VII
24.	Jemirun	Kadus VIII
25.	Wagiono, ST	Ketua BUMDes
26.	Askari	Sekretaris BUMDes
27.	Sunarwan	Bendahara BUMDes

Modal awal BUMDes ini bersumber dari APB Desa yang terdiri dari :

1) Penyertaan Modal Desa

Pemerintah Desa menyediakan dana untuk diinvestasikan pada BUMDes dalam bentuk penyertaan modal sebesar Rp. 50.000.000

2) Penyertaan Modal Masyarakat Desa

Bentuk dana sharing dari masyarakat diwujudkan berupa modal penyertaan, simpanan, dan bantuan yang tidak mengikat.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Proposal Pembentukan BUMDes Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa

**Tabel III**

<b>1</b>	<b>Biaya Operasional BUMDes</b>	
	Biaya Alat Tulis Kantor	Rp. 150.000
	Biaya Pelaporan dan Pertanggungjawaban	Rp. 250.000
	Biaya Koordinasi	Rp. 250.000
	Jumlah	Rp. 650.000
<b>2</b>	<b>Biaya Penguatan Kelembagaan BUMDes</b>	
	Biaya Musyawarah/Rapat	Rp. 500.000
	Biaya Pembahasan & Penyusunan AD/ART	Rp. 200.000
	Biaya Akta Notaris	Rp. -
	Biaya Lain-lain	Rp. -
	Jumlah	Rp. 700.000
<b>3</b>	<b>Biaya Sarana Prasarana BUMDes</b>	
	Biaya Pengadaan Mobile	-
	Biaya Pengadaan Peralatan & Administrasi Kantor	Rp. 500.000
	Pengadaan Brankas	Rp. 1.500.000
	Pengadaan Komputer & Printer	Rp. 7.000.000
	Jumlah	Rp. 9.000.000
<b>4</b>	<b>Biaya Pembangunan/Pengembangan Usaha BUMDes</b>	
	Pembangunan & Pengembangan Usaha BUMDes	Rp. 39.650.000
	<b>Jumlah Seluruhnya</b>	<b>Rp. 50.000.000</b>

**Tabel IV**

Analisa Pinjaman BUMDes Tunas Makmur Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa

No	Nilai Pinjaman/Modal	Waktu Pembayaran	Pengembalian	Keuntungan
1.	Rp. 300.000	10 Bulan	Rp. 330.000	Rp. 30.000
2.	Rp. 500.000	10 Bulan	Rp. 550.000	Rp. 50.000
3.	Rp. 1.000.000	10 Bulan	Rp. 1.100.000	Rp. 100.000
4.	Rp. 2.000.000	10 Bulan	Rp. 2.200.000	Rp. 200.000
5.	Rp. 2.850.000	10 Bulan	Rp. 3.135.000	Rp. 285.000
6.	Rp. 3.000.000	10 Bulan	Rp. 3.300.000	Rp. 300.000
7.	Rp. 5.000.000	10 Bulan	Rp. 5.500.000	Rp. 500.000
8.	Rp. 10.000.000	10 Bulan	Rp. 11.000.000	Rp. 1.000.000
9.	Rp. 15.000.000	10 Bulan	Rp. 16.500.000	Rp. 1.500.000
<b>JL</b>	<b>Rp.39.650.000</b>	<b>10 Bulan</b>	<b>Rp.43.615.000</b>	<b>Rp. 3.965.000</b>

#### **B. Struktur Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Bangun Rejo**

Dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa ini. Kepengurusan dipilih melalui Musyawarah Desa.

Kepengurusan BUMDes Tunas Makmur terdiri dari :

1. Badan Pengawas yang terdiri dari

- Ketua Badan Pengawas adalah Ketua BPD yaitu Mujian
  - Wakil Ketua Badan Pengawas adalah Ketua LKMD yaitu Tamsil
  - Sekretaris Badan Pengawas adalah Sekretaris LKMD yaitu Samidi,ST
2. Komisaris secara *ex officio* adalah Kepala Desa yaitu Misno
  3. Advisor BUMDes, disesuaikan dengan Kebutuhan Desa.
  4. Direktur yaitu Wagiono, ST
  5. Sekretaris yaitu Askari
  6. Bendahara yaitu Sunarwan.<sup>57</sup>

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Calon Pengurus BUMDes adalah :

- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- Sehat Jasmani dan Rohani;
- Mempunyai Jiwa Wirausaha;
- Bertempat tinggal dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 tahun berturut-turut;
- Berumur sekurang-kurangnya 20 tahun dan setinggi-tingginya 50 tahun;
- Berumur sekurang-kurangnya 20 tahun dan setinggi-tingginya 50 tahun;

---

<sup>57</sup> Peraturan Desa Bangun Rejo Nomor 03/a Tahun 2017 BAB VI tentang Kepengurusan

- Berkepribadian baik, jujur, adil dan tidak pernah melakukan tindak pidana, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian untuk memajukan perekonomian desa;
- Berpendidikan minimal SMA atau sederajat;
- Menyatakan kesediaannya untuk dicalonkan sebagai pengurus; dan
- Memenuhi persyaratan lain sebagaimana tertuang dalam AD/ART BUM Desa berdasarkan Musyawarah Desa.<sup>58</sup>

Pengurus BUMDes berhenti atau diberhentikan bilamana :

- Meninggal dunia;
- Mengundurkan diri;
- Pindah tempat Tinggal diluar desa;
- Berakhir masa baktinya;
- Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik maksimal 3 bulan berturut-turut termasuk dikarenakan sakit.
- Tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Desa ini dan atau syarat lain sebagaimana diatur dalam AD/ART BUMDes; dan atau
- Karena tersangkut tindak pidana;

---

<sup>58</sup> *Ibid*

- Mencemarkan nama BUMDes
- Melanggar norma atau adat yang berlaku di masyarakat.<sup>59</sup>

Masa Kerja Pengurus BUMDes Tunas Makmur Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) masa Kerja.<sup>60</sup>

### **C. Visi dan Misi Badan Usaha Milik Desa Bangun Rejo**

#### **Visi BUMDes Tunas Makmur**

Memakmurkan Masyarakat Desa Bangun Rejo dan terwujudnya kemandirian masyarakat menuju masyarakat yang sejahtera dan mandiri berlandaskan Iman dan Takwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.

#### **Misi BUMDes Tunas Makmur**

1. Memudahkan masyarakat desa Bangun Rejo mendapatkan pinjaman dana untuk pertanian, usaha kecil dan industri Rumah Tangga.
2. Mendorong dan memfasilitasi proses penguatan kelembagaan usaha masyarakat.
3. Menciptakan ruang dan peluang terhadap upaya pemberdayaan masyarakat miskin untuk meningkatkan kesejahteraan.

---

<sup>59</sup> *Ibid*

<sup>60</sup> AD/ART BUMDes Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa Pasal 5 tentang Masa Kerja Pengurus

4. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat dalam mengelola kegiatan Usaha dan Pertanggung Jawaban keuangan.<sup>61</sup>

#### **D. Tupoksi dan Kewenangan BUMDES Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa**

##### **Tugas dan Kewajiban Badan Pengawas**

- 1) Mengawasi pelaksanaan Rencana Pengembangan Jangka Panjang BUMDes serta pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan dan Penggunaan anggaran Pendapatan dan Belanja BUMDes;
- 2) Mengawasi dan memberi nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan BUMDes;
- 3) Bersama Komisaris memantau dan mengevaluasi kinerja direksi;
- 4) Mengkaji pembangunan penyebaran informasi dan transparansi pengelolaan BUMDes;
- 5) Mengawasi pelaksanaan manajemen resiko;
- 6) Mengawasi efektivitas penerapan *good corporate governance (GCG)* memantau kepatuhan organik BUMDes terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk PERDA dan PERDES;
- 7) Memberikan pendapat dan saran secara tertulis dalam Rapat Umum BUMDes
- 8) Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disampaikan pengurus BUMDes;

---

<sup>61</sup> AD/ART Badan Usaha Milik Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

- 9) Menandatangani Rencana Pengembangan Jangka Panjang BUMDes dan Rencana Kerja Tahunan;
- 10) Memberikan informasi dan laporan kepada pihak yang berkompeten tentang perkembangan dan kondisi BUMDes.<sup>62</sup>

### **Tanggung Jawab dan Wewenang Badan Pengawas**

- 1) Mengusulkan auditor eksternal jika dibutuhkan dalam pelaksanaan monitoring kegiatan BUMDes
- 2) Memberikan pendapat terhadap masalah-masalah strategis BUMDes.
- 3) Menyusun program kerja Badan Pengawas dan menempatkan personalnya sesuai dengan keahlian dan pengalaman masing-masing.
- 4) Menyusun mekanisme penyampaian informasi dari Badan Pengawas kepada *Stakeholder*.
- 5) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Badan Pengawas pada Rapat Umum BUMDes.

### **Tugas dan Kewajiban Komisaris**

- 1) Menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan dan atau Pemberhentian pengurus BUMDes
- 2) Bersama Badan Pengawas memantau dan mengevaluasi kinerja direksi

---

<sup>62</sup> Peraturan Desa Bangun Rejo Nomor 03.a / Tahun 2017 Tentang Tata Kerja



- 3) Memberi nasihat kepada direksi dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes
- 4) Memberi saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi perkembangan BUMDes
- 5) Meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUMDes.<sup>63</sup>

**Tanggung Jawab dan Wewenang Komisaris :**

- 1) Mengangkat dan memberhentikan pengurus BUMDes
- 2) Meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUMDes;
- 3) Memberi nasihat pada direksi dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes
- 4) Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes;
- 5) Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja kepengurusan.

**Hak Pengurus BUMDes**

- 1) Pengurus BUMDes berhak mendapat gaji dan tunjangan penghasilan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan BUMDes

---

<sup>63</sup> *Ibid*

- 2) Standar besaran gaji dan tunjangan pengurus diatur lebih lanjut dalam AD/ART BUMDes.
- 6) Melindungi BUMDes terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMDes.<sup>64</sup>

### **Tugas dan Kewajiban Pengurus BUMDes**

#### **Tugas :**

- 1) Menjalankan mengembangkan dan membina Badan Usaha Milik Desa agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi masyarakat luas;
- 2) Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi Desa yang adil dan merata;
- 3) Memupuk usaha kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya;
- 4) Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
- 5) Memberikan laporan perkembangan kepada Pemerintah Desa.
- 6) Tugas masing-masing jabatan pengurus BUMDes selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes

---

<sup>64</sup> *Ibid*

**Kewajiban Pengurus BUMDes**

- 1) Menyampaikan laporan pertanggung jawaban setiap akhir tahun kepada Pemerintah Desa;
- 2) Laporan kegiatan utama usaha dan perubahan selama tahun buku berjalan;
- 3) Laporan rincian neraca rugi laba dan penjelasan atas dokumentasi secara berkala paling sedikit 3 bulan sekali.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> *Ibid*

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Aturan Hukum dan Sistem Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa**

##### **1. Aturan Hukum Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa**

Berdirinya Badan Usaha Milik Desa dilandasi oleh Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa. Pendirian Badan Usaha Milik Desa ini disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan Kabupaten yang ikut memfasilitasi dan melindungi usaha Masyarakat desa dari ancaman persaingan para pemodal besar. Mengingat Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan, maka mereka masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. Pembangunan landasan bagi pendirian BUMDes adalah Pemerintah, baik pusat ataupun daerah.

Adapun Aturan Hukum Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ialah diantaranya :

**1) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, BAB X Badan Usaha Milik**

**Desa Pasal 87 s/d Pasal 90**

**Pasal 87**

- 1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa
- 2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan
- 3) BUM Desa dapat menjalankan\ usaha di bidang ekonomi dan/ atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 88**

- 1) Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa.
- 2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

**Pasal 89**

Hasil Usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk ;

- a) Pengembangan usaha; dan
- b) Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan

kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

## **Pasal 90**

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan :

- a) Memberikan hibah dan/atau akses permodalan;
- b) Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan
- c) Memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.<sup>66</sup>

## **2) PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, BAB VIII Badan Usaha Milik Desa Pasal 132 s/d Pasal 142**

### **Pasal 132**

- 1) Desa dapat mendirikan BUM Desa
- 2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa

---

<sup>66</sup> UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, BAB X Badan Usaha Milik Desa Pasal 87 s/d Pasal 90

- 3) Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintah Desa.
- 4) Organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas :
  - a) Penasihat; dan
  - b) Pelaksana Operasional
- 5) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dijabat secara *ex-officio* oleh Kepala Desa
- 6) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa
- 7) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa.

### **Pasal 133**

- 1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan usaha desa.

2) Penasihat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional mengenai pengurusan dan pengelolaan usaha desa.

#### **Pasal 134**

Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (4) huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga

#### **Pasal 135**

1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa

2) Kekayaan BUM Desa merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

3) Modal BUM Desa terdiri atas :

a) Penyertaan modal Desa; dan

b) Penyertaan modal masyarakat Desa

4) Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari APB Desa dan sumber lainnya.

5) Penyertaan modal Desa yang berasal dari APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bersumber dari :

a) Dana segar;



- b) Bantuan pemerintah
  - c) Bantuan pemerintah daerah; dan
  - d) Aset desa yang diserahkan kepada APB Desa.
- 6) Bantuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah kepada BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c disalurkan melalui mekanisme APB Desa.

### **Pasal 136**

- 1) Pelaksana Operasional BUM Desa wajib menyusun dan menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga setelah mendapatkan pertimbangan kepala desa.
- 2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUM Desa, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.
- 3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti , tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal.

- 4) Kesepakatan penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui musyawarah Desa.
- 5) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan oleh kepala Desa.

### **Pasal 137**

- 1) Untuk mengembangkan kegiatan usahanya, BUM Desa dapat :
  - a) Menerima pinjaman dan/atau bantuan yang sah dari pihak lain; dan;
  - b) Mendirikan unit usaha BUM Desa.
- 2) BUM Desa yang melakukan pinjaman harus mendapatkan persetujuan Pemerintah Desa.
- 3) Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan unit usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

### **Pasal 138**

- 1) Pelaksana Operasional dalam pengurusan dan pengelolaan usaha Desa mewakili BUM Desa didalam dan diluar pengadilan

- 2) Pelaksana Operasional wajib melaporkan pertanggungjawaban  
pengurusan dan pengelolaan BUM Desa kepada kepala Desa secara  
berkala.

### **Pasal 139**

Kerugian yang dialami oleh BUM Desa menjadi tanggung jawab pelaksana operasional BUM Desa.

### **Pasal 140**

- 1) Kepailitan BUM Desa hanya dapat diajukan oleh kepala Desa
- 2) Kepailitan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan  
sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan perundang-  
undangan.

### **Pasal 141**

- 1) Dalam rangka kerja sama antar-desa, 2 (dua) desa atau lebih dapat  
membentuk BUM Desa bersama.
- 2) Pembentukan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat  
dilakukan melalui pendirian, penggabungan, atau peleburan BUM Desa.
- 3) Pendirian, Penggabungan, atau peleburan BUM Desa sebagaimana  
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta pengelolaan BUM Desa  
tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-  
undangan.

## **Pasal 142**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, pengurusan, dan pengelolaan, serta pembubaran BUM Desa diatur dengan Peraturan Menteri.<sup>67</sup>

### **3) PERMENDES No.4 Tahun 2015 Bab III Tentang Pengurusan dan Pengelolaan BUM Desa**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Bentuk Organisasi BUM Desa**

### **Pasal 7**

- 1) BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum
- 2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan Masyarakat.
- 3) Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

### **Pasal 8**

BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi :

---

<sup>67</sup> PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, BAB VIII Badan Usaha Milik Desa Pasal 132 s/d Pasal 142

- a) Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal , dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
- b) Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

## **Bagian Kedua**

### **Organisasi Pengelolaan BUM Desa**

#### **Pasal 9**

Organisasi Pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.<sup>68</sup>

#### **Pasal 10**

- 1) Susunan Kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari :
  - a) Penasihat;
  - b) Pelaksana Operasional; dan
  - c) Pengawas.
- 2) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

---

<sup>68</sup> Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 , h.4

**Pasal 12**

- 1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- 2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
  - a) Melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat desa.
  - b) Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
  - c) Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
- 3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a) Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
  - b) Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;

- c) Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa sekurang-kurangnya 2(dua) kali dalam 1(satu) tahun.

### **Pasal 13**

- 1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) , Pelaksana Operasional dapat menunjuk Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
- 2) Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

### **Pasal 14**

- 1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi :
  - a) Masyarakat desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
  - b) Berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  - c) Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap dan perhatian terhadap usaha ekonomi desa; dan
  - d) Pendidikan minimal setingkat SMU/Madarasah Aliyah/ SMK atau sederajat;

2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan :

- a) Meninggal dunia;
- b) Telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
- c) Mengundurkan diri;
- d) Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa;
- e) Terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

### **Pasal 15**

- 1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- 2) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari :
  - a) Ketua;
  - b) Wakil Ketua merangkap anggota;
  - c) Sekretaris merangkap anggota;
  - d) Anggota
- 3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan rapat umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1(satu) tahun sekali.



- 4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk :
  - a) Pemilihan dan Pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b) Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa;
  - c) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana operasional.
- 5) Masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

## **Pasal 16**

Susunan kepengurusan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dipilih oleh masyarakat desa melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.<sup>69</sup>

## **Bagian Ketiga** **Modal BUM Desa**

### **Pasal 17**

- 1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa
- 2) Modal BUMDesa terdiri atas :

---

<sup>69</sup> *Ibid*, h.5-6

- a. Penyertaan Modal Desa; dan
- b. Penyertaan Modal Masyarakat Desa.

### **Pasal 18**

- 1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2)

huruf a terdiri atas :

- a. Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
- b. Bantuan pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
- c. Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
- d. Aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang aset Desa.

- 2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.<sup>70</sup>

#### **Bagian Keempat**

#### **Klasifikasi Jenis Usaha BUMDesa**

#### **Pasal 19**

- 1) BUMDesa dapat menjalankan bisnis sosial (social business) sederhana yang memberikan pelayanan umum (serving) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- 2) Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi :
  - a. Air minum Desa
  - b. Usaha listrik Desa;
  - c. Lumbung pangan; dan
  - d. Sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
- 3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa dan teknologi tepat guna.

---

<sup>70</sup> *Ibid*, h.7

**Pasal 20**

- 1) BUMDesa dapat menjalankan bisnis penyewaan (renting) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat desa dan ditujukan untuk memperoleh pendapatan asli desa.
- 2) Unit Usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi :
  - a. Alat transportasi;
  - b. Perkakas pesta;
  - c. Gedung pertemuan;
  - d. Rumah toko;
  - e. Tanah milik BUMDesa; dan
  - f. Barang sewaan lainnya.

**Pasal 21**

- 1) BUMDesa dapat menjalankan usaha perantara (brokering) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- 2) Unit Usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi :
  - a. Jasa Pembayaran Listrik;

- b. Pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat;  
dan
- c. Jasa Pelayanan lainnya.

## **Pasal 22**

- 1) BUMDesa dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (trading) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- 2) Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (trading) meliputi :
  - a. Pabrik es;
  - b. Pabrik asap cair;
  - c. Hasil pertanian;
  - d. Saran produksipertanian;
  - e. Sumur bekas tambang; dan
  - f. Kegiatan bisnis produktif lainnya.

## **Pasal 23**

- 1) BUMDesa dapat menjalankan bisnis keuangan (financial business) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.

- 2) Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat desa.

#### **Pasal 24**

- 1) BUMDesa dapat menjalankan usaha bersama (holding) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat desa baik dalam skala lokal desa maupun kawasan pedesaan.
- 2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUMDesa agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- 3) Unit Usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi :
  - a. Pengembangan kapal desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif.
  - b. Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
  - c. Kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

## Pasal 25

Strategi pengelolaan BUMDesa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUMDesa meliputi :

- a. Sosialisasi dan pembelajaran tentang BUMDesa.
- b. Pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUMDesa;
- c. Pendirian BUMDesa yang menjalankan bisnis sosial (*Social Business*) dan bisnis penyewaan (*renting*);
- d. Analisis kelayakan usaha BUMDesa yang berorientasi pada usaha perantara (*brokering*), usaha bersama (*holding*), bisnis sosial (*social business*), bisnis keuangan (*financial business*) dan perdagangan (*trading*), bisnis penyewaan barang (*renting*) mencakup aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum dan aspek perencanaan usaha.;
- e. Pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUMDes antar desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor.
- f. Diverifikasi usaha dalam bentuk BUMDesa yang berorientasi pada bisnis keuangan (*financial business*) dan usaha bersama (*holding*).

**Bagian Kelima****Alokasi Hasil Usaha BUMDesa****Pasal 26**

- 1) Hasil usaha BUMDesa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1(satu) tahun buku.
- 2) Pembagian hasil usaha BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUMDesa.
- 3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

**Bagian Keenam****Kepailitan BUMDesa****Pasal 27**

- 1) Kerugian yang dialami BUMDesa menjadi beban BUMDesa.
- 2) Dalam hal BUMDesa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.



- 3) Unit Usaha Milik BUMDesa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

## **Bagian Ketujuh**

### **Kerjasama BUMDesa antar Desa**

#### **Pasal 28**

- 1) BUMDesa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih.
- 2) Kerjasama antar 2(dua) BUMDesa atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota.
- 3) Kerjasama antar 2(sua) BUMDesa atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.

#### **Pasal 29**

- 1) Kerjasama antar 2(dua) BUMDesa atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- 2) Naskah Perjanjian Kerjasama antar 2(dua) BUMDesa atau lebih paling sedikit memuat :
  - a. Subjek kerjasama;
  - b. Objek Kerjasama;
  - c. Jangka Waktu;

- d. Hak dan Kewajiban;
  - e. Pendanaan;
  - f. Keadaan memaksa;
  - g. Pengalihan aset; dan
  - h. Penyelesaian Perselisihan
- 3) Naskah perjanjian kerjasama antar 2(dua) BUMDesa atau lebih ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUMDesa yang bekerjasama.

### **Pasal 30**

- 1) Kegiatan kerjasama antar 2(dua) BUMDesa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada desa masing-masing sebagai pemilik BUMDesa.
- 2) Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUMDesa yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

### **Bagian Kedelapan**

#### **Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUMDesa**

### **Pasal 31**

- 1) Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDesa kepada penasihat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa.
- 2) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUMDesa.
- 3) Pemerintah Desa mempertanggung jawabkan tugas pembinaan terhadap BUMDesa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.<sup>71</sup>

**4) Peraturan Desa Bangun Rejo Nomor : 03.a/ Tahun 2017 tentang BUMDES Tunas Makmur**

Berdasarkan hasil Musyawarah Desa disepakati nama BUMDes di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa ini diberi nama “BUMDes Tunas Makmur” dengan unit usaha yang dilakukan yaitu SIMPAN PINJAM DAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF DAN JUGA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH, ini sangat didukung karena di desa Bangun Rejo sangat membutuhkan dana tunai untuk modal usaha pertanian, industri kecil dan menengah dan juga untuk ekonomi kreatif.

---

<sup>71</sup> *Ibid*, h.8-10

Peraturan Desa Bangun Rejo Nomor : 03.a/ Tahun 2017 tentang BUMDES Tunas Makmur BAB XIV Azas, mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban.

**Pasal 20**

- 1) Azas Pengelolaan BUM Desa :
  - a. Pengelolaan Kegiatan BUMDesa dilakukan secara transparan, akuntabel dan akseptabel;
  - b. Warga masyarakat terlibat secara aktif;
  - c. Musyawarah untuk mufakat;
  - d. Kesenjangan dan Keadilan Gender;
  - e. Prioritas memiliki makna tingkat kemendesakan lebih diutamakan;
  - f. Pengelolaan kegiatan perlu berkelanjutan.
- 2) Mekanisme pengelolaan BUMDesa dilaksanakan dengan berpedoman pada azas Pengelolaan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dan lebih lanjut akan diatur dalam AD/ART BUMDesa;
- 3) Pertanggungjawaban :
  - a. Pertanggungjawaban BUMDesa disampaikan kepada masyarakat melalui forum Musyawarah BUMDesa.
  - b. Sistem pelaporan pertanggungjawaban, dibuat berdasarkan jenis usaha kegiatan.

- 4) Sistem pelaporan pertanggung jawaban dibuat dengan sistematis sebagai berikut :
  - a. Pendahuluan, memuat : latar belakang, maksud dan tujuan usaha;
  - b. Kegiatan usaha memuat : materi pelaksana/ tenaga kerja, produksi, penjualan/pemasaran, keuntungan dan kerugian;
  - c. Hambatan, memuat : materi pengadaan bahan baku, pemasaran, tenaga kerja, permodalan, dan mitra usaha;
- 5) Dalam rangka pengembangan usaha, BUMDesa dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga dengan prinsip saling menguntungkan.

## **2. Sistem Pengelolaan Pinjaman pada Badan Usaha Milik Desa**

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu :

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*);
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;

5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*);
6. Difasilitasi oleh pemerintah, Pemprov, Pemkab dan Pemdes;
7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, Anggota)<sup>72</sup>

Manfaat dikembangkannya BUMDes antara lain :

#### 1) Sumber Pendapatan Desa

BUMDes dapat menjadi sumber pendapatan desa yang dapat menyumbang kesejahteraan desa dan masyarakatnya. Hal ini dapat terjadi terutama jika BUMDes dikembangkan dengan sistem kepemilikan bersama.

#### 2) Menjadi Aset Desa

BUMDes dapat menjadi salah satu aset desa yang berwujud lembaga ekonomi. Desa dapat belajar mengembangkan kelembagaan ekonomi melalui BUMDes

#### 3) Kepercayaan

Melalui BUMDes, desa dapat bekerjasama dengan pihak lain dan ini dapat meningkatkan kepercayaan pihak lain terhadap desa.

---

<sup>72</sup> Departemen Pendidikan Nasional PKDSP, Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007, h.4-5

#### 4) Alat Demokratisasi Perekonomian Desa.

Melalui pembiayaan secara gotong royong dan kepemilikan bersama, BUMDes dapat menjadi alat mewujudkan demokratisasi ekonomi di desa.

### **B. Sistem Pengelolaan Pinjaman pada Badan Usaha Milik Desa di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa**

Berdasarkan hasil Musyawarah Desa disepakati nama BUMDes di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa ini diberi nama “BUMDes Tunas Makmur” dengan unit usaha yang dilakukan yaitu SIMPAN PINJAM DAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF DAN JUGA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH, ini sangat didukung karena di desa Bangun Rejo sangat membutuhkan dana tunai untuk modal usaha pertanian, industri kecil dan menengah serta untuk ekonomi kreatif.

Pada praktiknya, Sistem pengelolaan di BUMDes Tunas Makmur dikelola oleh pengurus BUMDes dengan sistem pinjaman tanpa ada hak bagi masyarakat/ nasabah untuk menyimpan dana di BUMDes. Hal ini dikarenakan dengan jalannya pengelolaan BUMDes, untuk menyimpan dana Masyarakat, desa harus bekerjasama dan mengurus administrasi melalui Bank. Dengan proses dan kesulitan ini, Pengurus BUMDes Tunas Makmur mengambil jalan

untuk mengelola sistem pinjaman tanpa ada hak simpanan bagi masyarakat/nasabah. Hal ini juga bertentangan dengan hasil musyawarah Desa yang telah disepakati.<sup>73</sup>

Dalam pengelolaan BUMDes Tunas Makmur di desa Bangun Rejo ini, Dimana warga yang membutuhkan pinjaman, wajib menggadaikan barangnya berupa BPKB Motor ataupun surat tanah dan lain sebagainya. Lalu, untuk pengembalian pinjaman masyarakat kepada pihak BUMDes dikenakan biaya tambahan 1% per bulan /setiap kali angsuran dan besaran bunga yang mencapai sekitar 12% setiap tahun. Dimana, besaran bunga tersebut akan menjadi keuntungan yang akan dibagi hasil oleh pihak desa dan pengurus BUMDes.<sup>74</sup>

Pengurus berpendapat, belum adanya perubahan dalam pengembangan ekonomi masyarakat dan belum ada terlihat dampak untuk mensejahterakan masyarakat di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa. Ini dilihat dari tidak adanya perkembangan Badan Usaha Milik Desa yang dikelola dalam jangka waktu setahun ini. Baik itu dilihat dari masyarakat maupun pengurus BUMDes sendiri. Dana yang telah di alokasikan ke Badan Usaha Milik Desa

---

<sup>73</sup> Askari, Sekretaris BUMDes, Wawancara Pribadi, Desa Bangun Rejo, 11 April 2018

<sup>74</sup> Askari, Sekretaris BUMDes, Wawancara Langsung, Desa Bangun Rejo, 10 Agustus 2018



ternyata semakin berkurang tanpa adanya peningkatan. Hal ini dikarenakan Tingkat keuntungan dalam jangka waktu lama menjadi penghalang untuk masyarakat yang meminjam dari BUMDes. Sehingga tidak ada usaha timbal balik antara BUMDes dan masyarakat.<sup>75</sup>

Dalam Pasal 87 Undang-Undang Desa menyatakan, BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Dengan semangat seperti ini BUMDes dapat menjadi alat/instrumen untuk membangun perekonomian desa yang demokratis, inklusif, dan berkelanjutan. Semangat kekeluargaan dan kegotong royongan ini memungkinkan bagi desa untuk membentuk BUMDes melalui skema pembiayaan yang adil atau pembiayaan secara gotong royong oleh masyarakat desa dan kepemilikan bersama oleh seluruh elemen masyarakat desa.<sup>76</sup>

#### **a) Pengelolaan Keuntungan BUMDes**

Keuntungan yang diperoleh masyarakat dari BUMDes tidak hanya berwujud uang, tetapi bisa juga berupa barang dan jasa, hingga pelayanan publik. Jika pembentukan BUMDes dimaksudkan untuk mengelola kekayaan sumber daya alam, maka bisa dipikirkan bagaimana pengelolaan dari hulu

---

<sup>75</sup> Wagiono ST, Direktur BUMDes, Wawancara Langsung, Bangun Rejo, 8 Agustus 2018

<sup>76</sup> Sri Palupi,dkk, *Buku Panduan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak*, (Jakarta : Lakpesdam PBNU,2016) h.82

hingga hilir bisa dilakukan di desa sehingga setiap rangkaian produksinya dapat memberi nilai tambah bagi desa. Nilai tambah ini tidak mesti berwujud uang, tetapi bisa juga berupa pelayanan publik, seperti layanan berobat gratis, pembayaran listrik rumah tangga dan UMKM, pendidikan gratis, dan lainnya. BUMDes akan lebih berdaya guna bila dapat berperan memfasilitasi pengembangan usaha rakyat. Misalnya, warga desa bisa melakukan transaksi jual beli hasil pertanian, peternakan, hasil olahan, produk hasil industri rumah tangga melalui BUMDes.<sup>77</sup>

#### **b) Pembagian Hasil BUMDes Bangun Rejo**

Adapun dalam hal pembagian hasil BUMDes Tunas Makmur Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa wajib menyetor surplus usahanya sebesar 10% setiap tahun ke Kas Desa. Surplus adalah pendapatan dari usaha unit-unit usaha setelah dikurangi biaya BUMDes dan resiko Usaha. Pendapatan adalah semua pendapatan BUMDes naik pendapatan Operasional, pendapatan Non Operasional, dan pendapat lain-lain yang diperoleh BUMDes selama jangka waktu 1 tahun buku. Biaya lain lain adalah semua biaya BUMDes baik biaya operasional, biaya non Operasional dan biaya lain-lain yang dikeluarkan

---

<sup>77</sup> *Ibid*, h.83-84

BUMDes dalam jangka waktu 1 tahun buku. Mekanisme penyetoran surplus usaha ke kas desa diatur dalam ketetapan BUMDes.

#### Penggunaan Keuntungan atau Surplus BUMDes

- 1) Surplus BUMDes diutamakan untuk pengembangan usaha
- 2) Surplus BUMDes setelah dikurangi kewajiban dapat digunakan untuk :

1.	Kewajiban Setoran ke Kas Desa	10 %
2.	Penambahan Modal	30 %
3.	Pengurus BUMDes	30 %
4.	Pengurus Unit	15 %
5.	Pendanaan Badan Pengawas	5 %
6.	Komisaris	5 %
7.	Dana Sosial	5 %
<b>Jumlah</b>		<b>100 %</b>

- 3) Mekanisme pembagian surplus diatur melalui ketetapan BUMDes
- 4) Bila BUMDes belum mempunyai surplus berjalan, maka pendanaan

BUMDes dan Badan Pengawas untuk sementara disubsidi dari modal

awal BUMDes yang dimasukkan kedalam biaya operasional BUMDes.

Adapun analisa pinjaman dalam Badan Usaha Milik Desa Tunas Makmur ialah sebagai berikut :

**Tabel V****Analisa Pinjaman BUMDes Tunas Makmur****Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa**

Presentase Pengembalian adalah 1% per Bulan

<b>No.</b>	<b>Nilai Pinjaman/ Modal</b>	<b>Waktu Pembayar an</b>	<b>Besarnya Pengembalia n</b>	<b>Keuntungan</b>
1.	Rp. 300.000	10 Bulan	Rp. 330.000	Rp. 30.000
2.	Rp. 500.000	10 Bulan	Rp. 550.000	Rp. 50.000
3.	Rp. 1.000.000	10 Bulan	Rp. 1.100.000	Rp. 100.000
4.	Rp. 2.000.000	10 Bulan	Rp. 2.200.000	Rp. 200.000
5.	Rp. 2.850.000	10 Bulan	Rp. 3.135.000	Rp. 285.000
6.	Rp. 3.000.000	10 Bulan	Rp. 3.300.000	Rp. 300.000
7.	Rp. 5.000.000	10 Bulan	Rp. 5.500.000	Rp. 500.000
8.	Rp. 10.000.000	10 Bulan	Rp. 11.000.000	Rp. 1.000.000
9.	Rp. 15.000.000	10 Bulan	Rp. 16.500.000	Rp.

				1.500.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 39.650.000</b>	<b>10 Bulan</b>	<b>Rp.</b> <b>43.615.000</b>	<b>Rp.</b> <b>3.965.000</b>

Dalam prakteknya, Surplus atau pembagian hasil tidak sesuai dengan hal-hal yang telah disepakati dalam musyawarah. Adapun yang terjadi dalam pembagian hasil dalam jalannya kurun waktu satu setengah tahun ini, para pengurus Badan Usaha Milik Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa belum mendapatkan pembagian hasil ataupun upah atas kinerjanya didalam BUMDes Tunas Makmur ini. Akibatnya, para pengurus kurang peduli terhadap perkembangan BUMDes Tunas Makmur yang ada di desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa.<sup>78</sup>

Menurut bapak Sunarwan, selaku Bendahara BUMDes Bangun Rejo memperkirakan bahwa, proses untuk mengembangkan ekonomi masyarakat maupun mensejahterakan masyarakat sesuai dengan tujuan berdirinya BUMDes, sangatlah tidak efektif dan tidak terlihat di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa. Hal ini dilihat dari ketidakmajuan peminjaman

---

<sup>78</sup> Wagiono ST, Direktur BUMDes, Wawancara Langsung, Bangun Rejo, 8 Agustus 2018

yang telah diberikan pihak BUMDes kepada masyarakat. juga pembagian hasil yang diberikan kepada pengurus BUMDes.<sup>79</sup>

Dalam hal meminjam di Badan Usaha Milik Desa, Masyarakat / nasabah tidak merasa keberatan atas potongan yang diambil dari masyarakat untuk BUMDes sebanyak 1% setiap bulannya, dikarenakan persentase tambahan yang sangat kecil. Inilah alasan masyarakat mengambil atau meminjam dana kepada pihak BUMDes.<sup>80</sup> Dengan keadaan dan kondisi ini, ada beberapa masyarakat yang sudah sadar atas berbahayanya tambahan atau riba dalam kehidupannya. Namun ada pula yang belum sadar dan belum paham tentang bahayanya riba dalam kehidupannya kedepan.<sup>81</sup>

Dana yang dipinjam masyarakat pada BUMDes biasanya digunakan untuk modal usaha masyarakat. jika ada untuk kepentingan pribadi, begitupun, harus ada syarat-syarat yang ditentukan dari pihak pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunas Makmur Desa Bangun Rejo ini. Namun sampai sekarang masyarakat yang meminjam di BUMDes hanya dikarenakan untuk modal usahanya saja. Menurut masyarakat / nasabah BUMDes, meskipun dalam

---

<sup>79</sup> Sunarwan, Bendahara BUMDes, Wawancara Langsung, Bangun Rejo, 12 Agustus 2018

<sup>80</sup> Irwan Sutrisno, Masyarakat (Nasabah BUMDes), Wawancara Langsung, Bangun Rejo, 5 September 2018

<sup>81</sup> Suyatmi, Masyarakat (Nasabah BUMDes), Wawancara Langsung, Bangun Rejo, 7 September 2018

pinjaman terdapat dana tambahan yang sering disebut dengan riba, namun dana tambahan yang dikeluarkan sangatlah sedikit. Sehingga masyarakat tidak merasa keberatan untuk dana tambahan yang dikeluarkan.<sup>82</sup>

### **C. Hukum Pengelolaan Pinjaman Badan Usaha Milik Desa pada Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa dilihat dari perspektif Wahbah Az-Zuhaili**

Berdasarkan praktek dalam Badan Usaha Milik Desa Tunas Makmur di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa, ada beberapa hal yang tidak sesuai dan menjadi tolak ukur ialah :

- 1) Adanya tambahan dalam sistem pengelolaan.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, riba adalah tambahan pada sesuatu tertentu atau kelebihan harta dalam pertukaran satu harta dengan harta yang lain tanpa adanya sesuatu pengganti.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili Dalam kitabnya *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*

فان كانت المنفعة للدافع, منع اتفاقا للنهي عنه, وخروجه عن باب المعرف, وان كانت

للقابض جاز

---

<sup>82</sup> Suprayitno, Masyarakat (Nasabah BUMDes), Wawancara Langsung, Bangun Rejo, 10 September 2018

Artinya :

*Jika keuntungan tersebut untuk pemberi pinjaman, maka para ulama bersepakat bahwa itu tidak diperbolehkan, karena ada larangan dari syariat dan karena sudah keluar dari syariat dan karena sudah keluar dari jalur kebajikan. Jika untuk penerima pinjaman, maka diperbolehkan.*<sup>83</sup>

2) Akad atau keputusan musyawarah dalam Peraturan Desa Bangun Rejo

Nomor : 03.a/ Tahun 2017 tentang BUMDES Tunas Makmur tidak sesuai dalam prakteknya. Dimana, dalam Peraturan Desa sistem pengelolaan BUMDes dilakukan dengan cara simpan pinjam dan usaha ekonomi produktif dan juga industri kecil dan menengah. Sedangkan dalam prakteknya, nasabah / masyarakat hanya diberi kesempatan meminjam tanpa ada hak untuk menyimpan dana nya.

Wahbah Az-Zuhaili mengungkapkan suatu akad ialah berhubungan ucapan salah satu dari dua orang yang ber akad dengan orang lain (pihak kedua) secara syara' dimana hal itu menimbulkan efeknya terhadap objeknya.<sup>84</sup>

3) Pengurus BUMDes dalam musyawarahnya serta dalam peraturan yang

ada, berhak mendapatkan upah atau pembagian hasil sebesar 30% dari

---

<sup>83</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, h.382

<sup>84</sup> *Ibid*, h. 420



BUMDes selama 1 tahun masa kerja. Sedangkan dalam prakteknya, Pengurus sudah jalan selama kurang lebih 2 tahun, namun tidak mendapatkan pembagian hasil apapun.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili mengungkapkan bahwa Upah / *Jualah* ialah sesuatu yang disiapkan untuk diberikan kepada seseorang yang berhasil melakukan perbuatan tertentu atau juga diartikan sebagai sesuatu yang diebrikan kepada seseorang karena telah melakukan pekerjaan tertentu.<sup>85</sup>

Adapun dalam hal-hal diatas, Bentuk pengelolaan pinjaman yang terjadi di BUMDes jatuh pada riba dikarenakan adanya tambahan dalam peminjaman tersebut. Pengelolaan dalam pembagian hasil untuk para pengelola (pengurus) BUMDes sendiri juga dianggap tidak adil dan tidak sesuai didalam prakteknya. Sehingga, dalam praktek pengelolaan BUMDes ini bukan hanya merugikan masyarakat saja. Tetapi lebih dari itu juga merugikan serta menzalimi para pengelola (Pengurus) BUMDes itu sendiri. Hal ini tentu kurang sesuai dengan maksud dan tujuan BUMDes untuk mensejahterakan masyarakat dengan adanya unsur kezaliman karena besaran bunga yang mencapai 12% setiap

---

<sup>85</sup> *Ibid*, h.432

tahun. Sehingga, itu kurang sesuai dengan perspektif Wahbah Az-Zuhaili dan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili Dalam kitabnya *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* ialah:

فان كانت المنفعة للدافع, منع اتفاقا للنهي عنه, وخروجه عن باب المعرف, وان كانت للقباض

جاز.<sup>86</sup>

Artinya :

*Jika keuntungan tersebut untuk pemberi pinjaman, maka para ulama bersepakat bahwa itu tidak diperbolehkan, karena ada larangan dari syariat dan karena sudah keluar dari syariat dan karena sudah keluar dari jalur kebajikan. Jika untuk penerima pinjaman, maka diperbolehkan.*<sup>87</sup>

Sehingga, Wahbah Az-Zuhaili bercondong dengan para *Zumhur Ulama* tentang tidak diperbolehkannya *Qardh* yang mendatangkan keuntungan.

Maka, dapat dilihat dari praktek Hukum Pengelolaan Pinjaman BUMDes menurut Wahbah Az-Zuhaili ialah tidak diperbolehkan dan hukumnya haram.

---

<sup>86</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islam wa Adillatuhu* Juz V, h.3796

<sup>87</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid 5, h.382

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat menyimpulkan bahwa analisis hukum pengelolaan pinjaman pada Badan Usaha Milik Desa dilihat dari perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa ) adalah :

1. Aturan hukum Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sudah diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, BAB X Badan Usaha Milik Desa Pasal 87 s/d Pasal 90, PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, BAB VIII Badan Usaha Milik Desa Pasal 132 s/d Pasal 142, PERMENDES No.4 Tahun 2015 Bab III Tentang Pengurusan dan Pengelolaan BUM Desa, dan Peraturan Desa Bangun Rejo Nomor : 03.a/ Tahun 2017 tentang BUMDES Tunas Makmur.
2. Sistem Pengelolaan Pinjaman Badan Usaha Milik Desa di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa, dalam praktek dan kesepakatannya sangat bertolak belakang. Sehingga aturan hukum serta musyawarah yang telah disepakati, tidak dijalankan dalam praktek di lapangannya.

Dalam pengelolaan dan pembagian hasil untuk pengurus juga tidak diberikan. Sehingga terjadi kezaliman dan ketidakadilan kepada pihak pengurus maupun masyarakat itu sendiri.

3. dilihat dari praktek Hukum Pengelolaan Pinjaman BUMDes menurut Wahbah Az-Zuhaili ialah tidak diperbolehkan dan hukumnya haram. Karena bentuk pengelolaan pinjaman yang terjadi di BUMDes jatuh pada riba dikarenakan adanya tambahan dalam peminjaman tersebut. Hal ini tentu kurang sesuai dengan maksud dan tujuan BUMDes untuk mensejahterakan masyarakat dengan adanya unsur kezaliman karena besaran bunga yang mencapai 12% setiap tahun. Sehingga, itu kurang sesuai dengan perspektif Wahbah Az-Zuhaili dan prinsip Hukum Ekonomi Syariah maupun maksud dan tujuan BUMDes itu sendiri.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Diharapkan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BumDes) lebih ditingkatkan dan dilihat panduan serta aturan Hukum BUMDes agar sesuai dengan teori dan prakteknya. Sehingga tidak terjadi kezaliman (ketidakadilan) baik antara BUMDes dengan Masyarakat (nasabahnya)

maupun BUMDes dengan Pengelolaanya (Pengurus). Sehingga kinerja para pengurus dapat dilihat dengan baik dan BUMDes yang tidak hanya memberikan modal usaha kepada masyarakat, tetapi mengupayakan usaha-usaha lain seperti pelayanan jasa, pengembangan hasil industri, pengelolaan pariwisata dan lain-lain sesuai dengan program-program BumDes yang ada.

2. Diharapkan kepada masyarakat Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa dalam melakukan sistem Pengelolaan Pinjaman harusnya berusaha menghindari timbulnya riba, yang menyebabkan pinjaman haram dalam transaksinya. Atau mengubah sistem pengelolaan selain pinjaman yang membuka peluang besar untuk mensejahterakan masyarakat Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa.
3. Diharapkan kepada tokoh agama, tokoh masyarakat dan seluruhnya harus saling mengingatkan serta memberikan pemahaman kepada masyarakat yang belum sadar akan bahaya nya riba dalam kehidupan dunia maupun akhirat kelak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta. 2002
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhu Al-Islam wa Adillatuhu Juz V*. Damaskus: Dar Al-Fikr. 1989
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Terjemah Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5*. Jakarta : Gema Insani Darul Fikir. 2011
- Chalid, Pheni. *Keuangan Daerah Investasi, Dan Desentralisasi tantangan dan hambatan*. Jakarta : Kemitraan. 2005
- Djamil, Faturrahman. *Hukum Ekonomi Islam Sejarah Teori dan Konsep*. Jakarta : Sinar Grafika. 2013
- Hadi,Sutrisno. *Metode Reseach*. Yogyakarta:Yayasan Penerbit Psikologi UGM. Cet. Ke-I. 1990
- Nashiruddin Al-Bani, Muhammad. *Sahih Al-Jami Al-Shagir*. Beirut : Al-Maktab Al-Islami. Jil,1
- Hajar Al-Asqalani,Ibnu. *Fath Al-Bari bisyarhi Shahih Al-Bukhari IV*, 1449
- Harahap,Isnaini,dkk. *Hadis-Hadis Ekonomi*. Jakarta : Kencana. 2015
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam perspektif Kewenangan Pengadilan Agama*. Jakarta : Kencana. 2012
- Muhammad, Abdul Kadir, Murniati,Rilda. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti. 2004
- Ridwan, Muhammad. *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka SM. 2007

- Subagyo, Joko P. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta. 1991
- Surahmad, Winarno. *Dasar dan Teknik Research*. Bandung : CV. Tarsito. 1972
- Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Raja Grafindo. 1998
- Usman, et al, Husaini. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara. Cet. Ke-I. 1996
- Miles, Mattew B dan Amichael Huberman. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Terjemahan Tjejep Rohendi Rohisi. Jakarta : Univeristas Indonesia. 2007
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta : Pena Pundi Aksara. 2008
- Kamal Rokan, Mustafa. *Bisnis Ala Nabi*. Yogyakarta : Bunyan 2013
- Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika. 2008
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group. 2013
- Syafi'i Antonio, Muhammad. *Bank Syariah dari teori ke praktik, cet ke-2*. Jakarta : Gema Insani. 2001
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. Bandung: Fokusmedia. 2010
- Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta :Amzah. 2013
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2016
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta : Wali. 2012
- bin Ali Asy-Syaukani, Muhammad. *Nail Al-Authar Juz 5 cet.I*. Beirut :Dar Al-Fikr. 1982

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2008

Syafei, Rachmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia. 2001

Peraturan Desa Bangun Rejo Nomor 03.a / Tahun 2017

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, BAB X Badan Usaha Milik Desa Pasal 87 s/d Pasal 90

PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, BAB VIII Badan Usaha Milik Desa Pasal 132 s/d Pasal 142

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015

Departemen Pendidikan Nasional PKDSP. Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. 2007

Palupi, Sri, dkk. *Buku Panduan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak*. Jakarta : Lakpesdam PBNU. 2016



## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Atikah Rahmah. Dilahirkan di Tanjung Morawa tepatnya di Kota Medan pada hari senin tanggal 4 Nopember 1996. Putri Pertama dari 3 bersaudara pasangan suami istri, Jailani Ludfi, S.P dan Nur Elbi Zuhri Lubis, S.E .

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri No.105855 PTPN II Tanjung Morawa pada tahun 2008, tingkat SLTP di SMP Negeri 14 Medan pada tahun 2011, dan tingkat SLTA di SMK Negeri I Medan Jurusan Pemasaran (*Marketing*) pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan *Muamalah* (Hukum Ekonomi Syariah) mulai tahun 2014. Semasa kuliah, penulis aktif di Organisasi Intra Fakultas yaitu Forum Kajian Ilmu Syariah sebagai Ketua Bidang Media Komunikasi dan Jaringan pada periode tahun 2015-2016 dan Ketua Bidang Kewirausahaan pada periode tahun 2016-2017.